

**KEBIJAKAN JEPANG DALAM MENGAMANKAN  
KEPANTINGANYA TERKAIT KONFLIK LAUT CINA SELATAN**

**SKRIPSI**



Disusun Oleh :

TUES KINDYANA  
151080116

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
YOGYAKARTA  
2013**

**KEBIJAKAN JEPANG DALAM MENGAMANKAN  
KEPENTINGANYA TERKAIT KONFLIK LAUT CINA  
SELATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Syarat-syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Dengan Spesialisasi Ilmu Hubungan  
Internasional**



Disusun Oleh :

TUES KINDYANA  
151080116

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"**

**YOGYAKARTA**

**2013**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA MAHASISWA : TUES KINDYANA  
NIM : 151080116  
JUDUL SKRIPSI : Kebijakan Jepang Dalam Mengamankan  
Kepentinganya Terkait Konflik Laut Cina Selatan

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional  
“Veteran” Yogyakarta

Pada Hari : Rabu  
Tanggal : 20 Februari 2013  
Jam : 09.00  
Tempat : Ruang Ujian Skripsi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Drs.Usmar Salam MIS

Drs.Endi Haryono M.si

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : TUES KINDYANA  
NIM : 151080116  
JUDUL SKRIPSI : Kebijakan Jepang Dalam Mengamankan  
Kepentingannya Terkait Konflik Laut Cina Selatan

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional  
“Veteran” Yogyakarta

Pada Hari : Rabu  
Tanggal : 20 Februari 2013  
Jam : 09.00  
Tempat : Ruang Ujian Skripsi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

### TIM PENGUJI

Drs.Usmar Salam, MIS

Ketua

Drs.Endi Haryono, M.Si

Anggota

Fauzan, S.IP, M.Si

Anggota

Anik Yuniarti, SIP, M.Si

Anggota

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tulisan skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan kecurangan/ penjiplakan / plagiat, maka saya siap menerima sanksi akademik, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Maret 2013-03-04

Tues Kindyana

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Kebijakan Jepang Dalam Mengamankan Kepentingannya Terkait Konflik Laut Cina Selatan" dengan baik dan lancar.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dalam program Strata satu dan meraih gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

Adapun penulisan kripsi ini dapat diselesaikan karena adanya dukungan dari berbagai pihak terkait dan pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Asep Saepudin, SIP, M.si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
2. Ibu Dra. Machya Astuti Dewi, M.si, selaku ketua jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
3. Bapak Drs.Usmar Salam MIS, selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas bimbingan bapak dalam mengarahkan penulis agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan benar.

4. Bapak Drs.Endi Haryona, SIP, M.si, selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas bimbingan bapak dalam mengoreksi setiap kata dan sitematika penulisan skripsi ini.
5. Bapak Fauzan, SIP, M.si, selaku Dosen wali sekaligus Penguji I yang telah memberikan Saran dan Masukan yang sangat Berarti dalam mendukung penulisan Skripsi saya menjadi lebih baik dan lebih sempurna.
6. Ibu Anik Yuniarti,S.IP, M.Si Selaku Dosen penguji II yang telah membirikan banyak masukan dalam menyempurnakan skripsi yang saya tulis ini.
7. Karyawan-karyawati bagian pengajaran Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
8. Terima kasih bagi semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam kelancaran studi dan penulisan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap agar karya kecil ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan Ilmu Hubungan Internasional.

Yogyakarta, 11 Maret 2013

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL DAN GRAFIK.....	x
DAFTAR GAMBAR DAN PETA .....	xi
DAFTAR SINGKATAN .....	xii
ABSTRAK.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Alasan Pemilihan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Perumusan Masalah.....	12
D. Kerangka Teori.....	12
E. Argumen Pokok.....	18
F. Jangkauan Penelitian.....	18
G. Metode Penelitian.....	19
H. Tujuan Penelitian.....	20
I. Manfaat Penelitian.....	20
J. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II KONDISI GEOGRAFIS, SEJARAH, PERKEMBANGAN DAN SIKAP JEPANG DALAM KONFLIK LAUT CINA SELATAN.....</b>	<b>23</b>
A. Kondisi Geografis Laut Cina Selatan.....	23



B. Sejarah Konflik Laut Cina Selatan.....	30
1. Latar Belakang Sengketa.....	31
2. Sengketa Bilateral.....	35
3. Sengketa Multilateral.....	39
C. Perkembangan Konflik Laut Cina Selatan.....	41
D. Sikap Jepang dalam Konflik Laut Cina Selatan...	44

**BAB III KEBIJAKAN JEPANG DALAM MENGAMANKAN  
KEPENTINGAN POLITIK DI LAUT CINA  
SELATAN.....47**

A. Menjaga Stabilitas Keamanan Laut Cina Selatan...	48
1. Keikutsertaan Jepang dalam ASEAN Regional Forum (ARF).....	49
2. Melakukan Patroli Gabungan di Laut Cina Selatan.....	52
B. Melakukan Kerjasama Maritim dengan Negara kawasan dan AS untuk Menekan Perkembangan Cina di LCS...	53
1. Melakukan Kerjasama dengan AS.....	54
2. Kerjasama Jepang-India.....	59
3. Kerjasama Jepang-Indonesia.....	62
4. Kerjasama Jepang-Kamboja.....	65
5. Kerjasama Jepang-Australia.....	67
C. Meningkatkan Kekuatan Bidang Pertahanan.....	69
1. Kebijakan Pertahanan Jepang Pasca Perang Dingin- 2007.....	69
2. Perubahan Badan Pertahanan Jepang.....	73
3. Peningkatan Militer Jepang.....	75

<b>BAB IV KEBIJAKAN JEPANG DALAM MENGAMANKAN KEPENTINGAN EKONOMI DI LAUT CINA SELATAN.....</b>	<b>82</b>
A. Pengamanan Jalur Ekspor-Import.....	83
1. Jalur Ekspor Jepang.....	84
2. Jalur Import Jepang.....	88
a. Import Minyak Jepang dari Timur Tengah.....	89
b. Import Batu bara dan Gas Alam Cair Jepang...	91
c. Import Produk Pertanian dan Perikanan.....	92
B. Kerjasama Ekonomi untuk Mengamankan Kepentingan Jepang dan menekan Cina di Asia Tenggara.....	95
1. Memperkuat Industri Jepang di Asia Tenggara...	97
a. Industri Transportasi dan Mesin.....	98
b. Industri Elektronik.....	99
c. Industri Bahan Makanan dan Minuman.....	101
2. Memperkuat Investasi Jepang di Asia Tenggara..	102
C. Bantuan Jepang Di Asia Tenggara.....	104
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>110</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>117</b>

**DAFTAR TABEL DAN GRAFIK**

Tabel 1.1	Bukti Keaktifan Jepang.....	6
Tabel 3.1	Perbandingan Alutsista Jepang-Cina...	76
Tabel 4.1	Negara Sumber Impor Jepang.....	88
Tabel 4.2	Impor Minyak Jepang (2003-2010).....	90
Tabel 4.3	Impor Produk Pertanian dan Perikanan Jepang dari Asia Tenggara.....	94
Tabel 4.4	Official Development Assistance Jepang di Asia Tenggara.....	108
Grafik 4.1	Jumlah Ekspor Jepang (2011-2013).....	85
Grafik 4.2	Negara Sumber Impor Jepang 2007-2011.	93

**DAFTAR GAMBAR DAN PETA**

Gambar 3.1	Armada Angkatan Laut Jepang.....	77
Peta 2.1	Peta rute perdagangan yang melewati Laut Cina Selatan.....	26
Peta 2.2	Peta Rute Perdagangan dari dan ke Jepang.....	27

**DAFTAR SINGKATAN**

APEC	: Asia-Pasfic Economic Cooperation
AS	: Amerika Serikat
ASEAN	: Asosiation of South East Asia Nations
CIIS	: China Institute of International Studies
Dephan	: Departemen Pertahanan
EAI	: East Asia Institute
EAS	: East Asia Summit
FDI	: Foreign Direct Investment
IEA	: International Energy Agency
ISEAS	: Institute of South Eas Asia Studies
JASDF	: Japan Air Self Defence Force
JDA	: Japan Defence Agency
JGSDF	: Japan Ground Self Defence Force
JMSDF	: Japan Maritime Self Defence Force
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
MITI	: Minister-Ministry of International Trade and Industry
NDPG	: National Defence Program Guidelines
NDPO	: National Defence Program Outline
NIE's	: Newly Industrialised Economies
ODA	: Official Development Assistance

OECD	: Organisation for Economic Cooperation and Developmen
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PMC	: Post Ministerial Conferance
SAR	: search and resque
SBY	: Susilo Bambang Yudoyono
SIPRI	: Stockholm International Peace Resarch Institute
SLOC	: Sea Lines Of Communications
TMD	: Theater Missile Defence
UNCLOS	: United Nations Convention on the Law Of the Sea
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

## ABSTRAK

Jepang merupakan negara Industri terkuat nomor dua di Dunia Setelah Amerika Serikat. Kekuatan ekonomi Jepang menjadi tolak ukur bagi Jepang dalam menentukan kebijakan Luar negerinya. Kegiatan ekspor dan impor yang lancar juga menjadi suatu elemen yang penting bagi kekuatan ekonomi Jepang. Kegiatan ekspor impor jepang ini sebagian besar melalui jalur laut yang melewati Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan adalah laut semi tertutup yang menjadi jalur utama perdagangan Internasional, Laut Cina Selatan mempunyai kekayaan alam yang besar. Laut Cina Selatan diperebutkan oleh negara-negara sekitar antara lain Cina, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia, brunei darussalam. Sengketa di Laut Cina Selatan sudah terjadi sejak lama hingga 2013 ini belum dapat terselesaikan.

Dalam sengketa Laut Cina Selatan ini Jepang mengambil kebijakan aktif, Jepang berinisiatif aktif di Laut Cina Selatan karena Jepang mempunyai beberapa kepentingan yang harus dilindungi. Jepang mengajak India dan negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk membentuk forum multilateral yang kusus membahas masalah Laut Cina Selatan, Jepang juga bersedia memfasilitasi terselenggaranya forum tersebut.

Jepang tidak ingin terjadi pecah perang terbuka di Laut Cina Selatan sehingga Jepang melakukan patroli Gabungan di Laut Cina selatan, selain itu juga melakukan kerjasama maritim baik dengan negara yang berkonfil ataupun negara kawasan lainnya. Dalam melindungi kepentingan politikya Jepang juga meningkatkan kekuatan di bidang pertahanan. Sedangkan untuk melindungi kepentingan ekonomi Jepang mempererat kerjasama ekonomi dengan negara kawasan, selain itu jepang juga memperkuat industri dan investasinya di Asia Tenggara serta memberikan bantuan pembangunan pemerintahan atau *Official Defelopment ssistance* (ODA).

Kata Kunci: Jepang, Laut Cina Selatan, Kebijakan, kepentingan

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Laut Cina Selatan pada dasarnya merupakan *no man's island* karena kawasan ini tidak dimiliki oleh siapapun melainkan digunakan sebagai jalur perdagangan internasional.

Berdasarkan Konvensi PBB dalam Hukum Laut *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), yang telah diadopsi pada tahun 1982, setiap negara berhak untuk memasukkan wilayah hingga 12 mil laut sebagai bagian dari kedaulatannya dan 200 mil laut untuk *Zona Ekonomi Eksklusif* (ZEE). Namun, salah satu pasal lain dalam UNCLOS yang berbunyi bahwa kawasan bebatuan yang tidak dapat menopang habitat manusia atau kehidupan ekonominya sendiri maka tidak memiliki *Zona Eksklusif* atau *batas kontinen*, seringkali menjadi alasan dari negara-negara yang melakukan klaim sepihak atas kepulauan *Spartly* atau wilayah Laut Cina Selatan untuk melakukan *eksplorasi* dan *eksploitasi*.

Ketegangan politik antar negara-negara pengklaim kawasan ini sebenarnya telah berlangsung sejak lama,



tetapi aksi Cina yang melakukan patroli akhir-akhir ini menimbulkan ketegangan politik di kawasan Asia. Pada awal Juni 2011, 11 kapal Angkatan laut Cina, termasuk jenis *Destroyer*, berlayar antara pulau Okinawa dan Sakishima setelah melakukan pengeboran di kawasan Pasifik Barat, bagian timur Filipina. Cina juga terlihat meningkatkan latihan angkatan lautnya di kawasan ini dari tahun ke tahun. Aksi Cina ini disinyalir dapat memicu negara-negara yang bersengketa lainnya melakukan hal serupa, yang tentunya akan mengganggu keamanan jalur laut internasional.<sup>1</sup>

Negara yang terlibat dalam Konflik Laut Cina Selatan adalah Cina, Taiwan, dan Negara-negara Asia Tenggara diantaranya Vietnam, Filipina, Brunai Darussalam dan Malaysia. Meskipun saat ini Jepang tidak terlibat dalam konflik tersebut dan tidak memiliki kepentingan kedaulatan atas Laut Cina Selatan, namun Jepang memiliki kepentingan yang besar terkait dengan jalur perdagangan internasionalnya. Jepang juga berpotensi untuk tertarik ke dalam konflik regional tersebut karena secara tidak langsung Jepang mempunyai

---

<sup>1</sup>"Jepang-Indonesia dan Konflik Laut Cina Selatan," Dalam <http://www.jpfi.or.id/artikel/studi-jepang-pertukaran-intelektual/jepang-indonesia-dan-konflik-laut-cina-selatan>, Diakses pada 10 Juli 2012.

kepentingan di wilayah Laut Cina Selatan.

Ini menjadi suatu ketertarikan bagi penulis untuk menggali lebih dalam bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Jepang dan juga yang akan dilakukan oleh pemerintah Jepang agar tidak tertarik dalam konflik regional tersebut dan Jepang tidak terganggu atas ketegangan yang terjadi di Laut Cina Selatan.

## **B. LATAR BELAKANG MASALAH**

Jepang adalah Negara kepulauan dengan 3000 (Tiga Ribu) buah pulau. Sumber daya alam yang dimiliki Jepang dengan luas daratan 373.000 km<sup>2</sup> dan luas lautan 5,000 km<sup>2</sup> sangat terbatas. Sementara itu, biji-biji yang mengandung logam sulit diproses karena memiliki kandungan rendah. Jepang mempunyai area yang sangat terbatas. 80% terdiri dari pegunungan dan tidak banyak terdapat Sumber Daya Alam, bahkan dapat dikatakan bahwa Jepang adalah negara yang miskin Sumber Daya Alam. Akan tetapi Jepang menjadi salah satu Negara yang terbaik dalam bidang industri dan ekonomi. saat ini Jepang menjadi raksasa ekonomi nomor dua di dunia, Jepang mengimpor bahan baku dan mengekspor sebagai barang jadi.

Jepang sebagai negara industri maju memiliki perhatian yang besar terhadap energi misalnya. Energi memainkan peranan penting bagi perekonomian Jepang, sehingga faktor keamanan dan ketersediaan pasokan energi sangat penting bagi negara ini. Sebagai negara maju, Jepang menjadi negara yang mengkonsumsi energi paling besar. Jepang menjadi negara konsumen terbesar kedua energi dunia jenis minyak bumi. Begitupun tingkat ketergantungan Jepang terhadap energi minyak bumi. Ketergantungan Jepang terhadap minyak bumi begitu besar hingga mencapai 100 persen. Hal ini juga sekaligus menandakan bahwa Jepang sebagai negara industri maju dan besar memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya alam.<sup>2</sup>

Sebagai negara yang tumbuh sebagai negara maju, maka Jepang dituntut untuk memperbanyak cadangan energi agar perekonomian Jepang dapat terus berjalan dengan baik, sehingga okupasi Jepang terhadap negara-negara Asia merupakan bagian dari ekspansi energi yang dilakukan oleh Jepang. Pasca Perang Dunia II pada akhir tahun 1970-an, Jepang juga merasakan bagaimana beratnya krisis minyak yang melanda hampir sebagian negara-

---

<sup>2</sup> William T. Tow, Mark J. Thomson, Yoshinobu Yamamoto, and Satu P. Limaye, *Asia-Pacific Security: US, Australia and Japan and The New Security Triangle*, New York: Routledge, 2007, hal 60.

negara importir minyak di dunia. Belajar dari pengalaman tersebut, maka Jepang terus meningkatkan hubungan dengan negara-negara pengekspor minyak atau negara-negara Arab dan Timur Tengah untuk menjamin lancarnya suplai energi ke Jepang<sup>3</sup>. Laut Cina Selatan merupakan jalur terpenting bagi Jepang untuk melakukan segala kegiatan tersebut, sehingga ini merupakan suatu tantangan bagi Jepang untuk menjaga stabilitas keamanan Negara maupun kawasan terkait dengan sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan.

Dalam konflik Laut Cina Selatan, Jepang mengambil kebijakan aktif. Setiap negara menyerukan perdamaian di Laut Cina Selatan termasuk Jepang. Jepang tidak hanya menyerukan perdamaian di Laut Cina selatan, tetapi Jepang juga melakukan beberapa tindakan.

---

<sup>3</sup> *Ibid,hal 61*

Tabel 1.1  
Bukti keaktifan Jepang

Tahun	Keterangan
2010	Jepang mengajak pemerintah AS untuk melakukan diskusi untuk mengirimkan marinir AS korps dan SDF Jepang untuk memberikan fasilitas militer di Filipina, yang bertempat di Luzon dan Palawan, pulau yang menghadap Laut Cina Selatan.
2010	Jepang juga memperkuat penjaga pantai dan kemampuan angkatan laut dari Filipina dan Vietnam (kedua negara penuntut di Laut Cina Selatan)dengan menempatkan JMSDF ( <i>Japan Maritim Self Defence Force</i> )
2010	Jepang membentuk badan konsultatif keamanan maritim yang terdiri dari pejabat tinggi pemerintahan dan para ahli. Ruang lingkup kerjanya meliputi pencegahan konflik terbuka, pembajakan dan polusi perairan laut di Laut Cina Selatan.
2011	Menteri Luar Negeri Jepang Koichiro Gamba mengajak India,Indonesia, malaysia dan negara-negara asia tenggara lainnya menyelenggarakan forum multilateral untuk menyelesaikan sengketa maritim di Laut China Selatan selama tur ke negara-negara tersebut.
2012	Jepang berinisiatif untuk kerjasama dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan untuk meredakan ketegangan di Laut Cina Selatan, dan mengajak AS dan India untu melakukan pembicaraan tentang isu-isu keamanan regional.

2012	Jepang Maritime Self-Defense Force (JMSDF) dikerahkan ke Laut Cina Selatan awal tahun 2012 untuk latihan militer kecil bersama dengan angkatan laut AS dan Australia di lepas pantai Brunei. pelatihan gabungan ini untuk pertama kalinya dilakukan di Laut Cina Selatan. Tujuan dari pelatihan ini dikombinasikan bersama adalah untuk memperingatkan terhadap China, yang terus-menerus mengklaim kedaulatan nya di Laut Cina Selatan dan memperkuat tekanan dia untuk pindah ke daerah.
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : "EAI background Brief no:756", dalam <http://www.eai.nus.edu.sg/BB.htm> diakses tanggal 14 Desember 2012.

Tabel 1.1 adalah bukti keaktifan Jepang dimana dalam beberapa Forum Jepang selalu mengangkat isu sengketa Laut Cina Selatan. Jepang memang tidak memiliki kepentingan langsung di Paracel atau Kepulauan Spratly, namun Jepang sebagai negara yang bertopang pada ekonominya yang kuat memiliki kepentingan untuk memastikan ketegangan di Kawasan Laut Cina Selatan tidak membengkak, dari tabel diatas memang sangat terlihat bahwa Jepang ingin aktif melibatkan diri dalam penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, Jepang harus bertindak atas kepentingannya tersebut.

Dalam deklarasi bersama untuk memperkuat kemitraan strategis, Perdana menteri Jepang Yoshihiko

Noda juga menawarkan penyelenggaraan konferensi multilateral yang membahas tentang kerjasama maritim yang terbuka bagi para pejabat pemerintah di Asia Timur dan Asia Tenggara dan juga para ahli dari sektor swasta dan Jepang bersedia untuk memfasilitasi. Tawaran tersebut mencerminkan kekhawatiran Jepang akan menguatnya upaya Cina untuk masuk ke Asia Tenggara.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Jepang-ASEAN digelar mendahului KTT Asia Timur , yang akan mempertemukan pemimpin ASEAN dengan delapan mitra dialog - Jepang, Cina, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, India, Amerika Serikat dan Rusia di Bali.<sup>4</sup>

Keamanan maritim akan menjadi perhatian utama pertemuan *East Asia Summit* (EAS), dengan tekanan pada sengketa teritorial di Laut Cina Selatan daerah lintasan kapal yang dipercaya mengandung minyak dan mineral berharga. Perdana Menteri Cina Wen Jiabao, sebelumnya memperingatkan bahwa "kekuatan luar" tidak punya alasan untuk ikut terlibat. AS maupun negara lain diminta agar tidak ikut campur dalam isu-isu sensitif.

---

<sup>4</sup> "Khawatirkan Cina, Jepang Tawarkan Investasi dan Kerjasama Maritim kepada ASEAN", dalam [http://www.ipotnews.com/index.php?jdl=Khawatirkan\\_Cina\\_Jepang\\_Tawarkan\\_Investasi\\_dan\\_Kerjasama\\_Maritim\\_kepada\\_ASEAN&level2=&level3=&level4=topnews&id=832829&urlImage](http://www.ipotnews.com/index.php?jdl=Khawatirkan_Cina_Jepang_Tawarkan_Investasi_dan_Kerjasama_Maritim_kepada_ASEAN&level2=&level3=&level4=topnews&id=832829&urlImage) diakses tanggal 8 Desember 2012.

Tapi, seorang pejabat Jepang menegaskan bahwa pihaknya terpenggil untuk ikut mengupayakan penyelesaian sengketa.<sup>5</sup> Seiring dengan meningkatnya kepercayaan dan kekuatan militer Cina, akhir-akhir ini Tokyo rajin menggalang kerjasama pertahanan dengan Asia Tenggara. September lalu, Jepang bersepakat dengan Philipina untuk memperkuat kerjasama mereka dalam pengamanan perairan, dan angkatan laut. Oktober lalu, Jepang bersepakat dengan Vietnam untuk kerjasama pertahanan mereka.<sup>6</sup>

Inisiatif Jepang untuk melakukan upaya damai di Laut Cina Selatan juga diperkuat oleh pernyataan Diplomat Jepang Toshinao Urabe yang mengatakan bahwa Jepang memiliki kepentingan untuk memastikan Laut Cina Selatan tersebut aman dan terbuka untuk perdagangan. Dan tidak menutup kemungkinan bagi Jepang untuk mengupayakan penyelesaian sengketa tersebut dengan cara damai berdasarkan hukum internasional, demikian seperti dilansir *Associated Press*, pada 21 September 2011.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> "Jepang di Asia Tenggara", dalam [http://www.waspada.co.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=61364&Itemid=27](http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=61364&Itemid=27) diakses tanggal 5 Noveber 2012.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> "Jepang turun tangan dalam sengketa Laut Cina Selatan", dalam <http://kampus.okezone.com/read/2011/09/21/413/505059/jepang-turun-tangan-dalam-sengketa-laut-china-selatan> diakses tanggal 14 Desember 2012.



Selain itu, Dr Lam Peng Er, *Senior research fellow* dari EAI (*East Asia Institute*) dalam artikel dari EAI *Background Brief no. 756* yang berjudul *Japan and The South China Sea Dispute: Seeking a More Active Political Role*, yang menyatakan bahwa, Jepang mulai terlihat aktif dalam sengketa Laut Cina Selatan dan hal itu membangkitkan kecurigaan Cina terhadap Jepang.

Zhang Yaohua seorang anggota asosiasi peneliti dari CIIS (*China Institute of Internasional Studies*) dalam artikelnya yang berpendapat bahwa:

*"Since the United States showed "concerns" over South China Sea issue in 2010, Japan has actively engaged itself in South China Sea issue while pressing China on the East China Sea disputes. Japan's behaviors are not merely coincidental but rather closely related to its policies toward China on the ocean issues. On the South China Sea issue, Japan has adopted different policies in different time periods as follows:*

- (1) no objection to its ownership in early postwar time;*
- (2) paying attention to South China Sea issue in the 1980s;*
- (3) intentional intervention after the Cold War;*
- (4) proactive involvement at present.*

*The priorities of Japan's ocean strategy in future will be the expansion in south China Sea and Pacific Ocean. With a bunch of ingredients for consideration such as waterway security, containing China, restraining China's ocean development and making over the initiative in south China Sea negotiation between the disputing countries".<sup>8</sup>*

---

<sup>8</sup> Zhang Yaohua "The Role of Japan on the South China Sea Issue", dalam [http://www.ciis.org.cn/english/2011-11/18/content\\_4635283.htm](http://www.ciis.org.cn/english/2011-11/18/content_4635283.htm) diakses tanggal 14 Desember 2012.

Dalam pendapatnya diatas Zhang menilai bahwa Jepang mempunyai kebijakan yang proaktif di Laut China Selatan dan Jepang berinisiatif untuk membentuk negosiasi membahas Laut China Selatan.

Dr. Ian Storey ,Peneliti senior di *Institute of Southeast Asian Studies* (ISEAS), Singapore mengatakan bahwa Jepang selalu mengawasi Laut Cina Selatan,namun setelah memanasnya kembali ketengangan di Laut Cina Selatan pada tahun 2008, Jepang mengambil kebijakan yang lebih proaktif. Jepang bertekad untuk memainkan peran utama dalam upaya damai Laut Cina Selatan.<sup>9</sup>

Adanya masalah di Laut Cina Selatan mengakibatkan kemandirian beberapa Negara terancam khususnya negara-negara yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang besar di wilayah Laut Cina Selatan salah satunya adalah Jepang. Maka dari itu Jepang menginginkan adanya solusi damai di Laut Cina Selatan agar kelancaran akan kepentingannya di Laut Cina Selatan terjamin maka dari itu Jepang aktif menyuarakan perdamaian di Laut Cina Selatan.

---

<sup>9</sup> Ian Storey, " Japan Steps Up to the South China Sea Plate", dalam <http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303567704577516252626896574.html> diakses tanggal 15 desember 2012.

### C. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut :

Mengapa Jepang berinisiatif aktif membuat kebijakan pengamanan di Laut Cina Selatan?

### D. KERANGKA TEORI

Dalam melakukan suatu penelitian yang bersifat ilmiah, diperlukan seperangkat teori maupun konsep sebagai pijakan dasar untuk memulainya. Tentu saja teori dan konsep disini harus relevan dengan penelitian yang dilakukan. Untuk menjelaskan jawaban dari pertanyaan di perumusan masalah tersebut, maka di gunakan kerangka berfikir yang didasari pada teori **Kebijakan Pertahan** yang mengarah pada **Keamanan Nasional** sebagai berikut:

#### **Teori Kebijakan Pertahanan**

Kebijakan pertahanan merupakan keseluruhan rencana atau program yang disusun dan tindakan yang diambil oleh sebuah bangsa di masa perang maupun masa damai untuk melindungi keamanan negara dari ancaman militer negara lain ataupun dari gerakan separatis

negerinya sendiri.<sup>10</sup> Dalam menjaga eksistensi, suatu negara perlu mengembangkan sistem pertahanannya. Ada tiga alasan yang mendasar antara lain:

- 1) hak sebuah bangsa untuk hidup dan mempertahankan diri dari serangan penindasan bangsa lain;
- 2) kebutuhan akan rasa aman dari gangguan pemberontakan internal yang mengganggu upaya pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi rakyatnya;
- 3) sistem internasional yang anarkis setiap saat dapat memunculkan dilema keamanan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri.<sup>11</sup>

Dalam hal ini Jepang lebih kepada mempertahankan diri dari ancaman bangsa lain dan ancaman dari lingkungan internasional. Dapat dilihat dari Upaya pertahanan keamanan Jepang dari ancaman Cina yang sedang mengembangkan kekuatan maritimnya terkait konflik Laut Cina Selatan.

Kebijakan pertahanan bertujuan untuk menjaga keutuhan keselamatan segenap bangsa dari ancaman adalah dasar utama untuk menyusun perencanaan perumusan konsepsi, strategi, postur kekuatan dan program pembangunan kekuatan pertahanan, serta lahirnya

---

<sup>10</sup> Trevor Nevitt Dupuy, *International Military and Defence Encyclopedia*, Brassey's, United States 1992, hal. 7.

<sup>11</sup> *Ibid*

landasan hukum untuk mewujudkan program yang ditetapkan.

Samuel Huntington menjelaskan bahwa kebijakan pertahanan merupakan suatu keputusan yang dipengaruhi oleh kebijakan politik domestik dan luar negeri yang juga meliputi ancaman secara umum dalam lingkungan ekonomi politik internasional dan menerapkannya dalam politik domestik. Sedangkan Douglas J. Murray dan Paul R. Viotti menjelaskan sedikitnya ada empat hal yang mempengaruhi kebijakan pertahanan di setiap negara yaitu, *pertama*, kondisi lingkungan internasional yang dapat dirasakan oleh setiap negara itu sendiri, *kedua*, sasaran dari tujuan nasional, strategi dan doktrin dari militer negaranya, *ketiga*, proses dalam pembuatan pertahanan negara, *keempat*, berbagai isu yang sering terjadi, seperti penggunaan peralatan militer yang canggih, kontrol persenjataan dan hubungan sipil-militer.<sup>12</sup>

Cina sedang mengembangkan kekuatan maritimnya menjadi Kekuatan Laut Lintas Samudra. Setelah memanasnya kembali Konflik Laut Cina Selatan juga membuat Cina meningkatkan anggarannya militernya. Berdasar

---

<sup>12</sup> Douglas J. Murray and Paul R. Viotti, *The Defence Policies of Nations: A Comparative Study*, Jhon Hopkins University press, London, 1992, hal. XIX.

studi SIPRI (*Stockholm International Peace Research Institute*, 2010), Cina merupakan negara Asia dengan anggaran militer terbesar. Pada 2000, militer Cina sudah menghabiskan anggaran militer sebesar US\$90 miliar dan pada 2010, semakin meningkat mencapai US\$120 miliar. Saat ini Cina memiliki 2,3 juta tentara. Angkatan Daratnya saat ini merupakan kekuatan paling besar di dunia. Pada 2012 tahun ini, anggaran militer Beijing mencapai US\$160 miliar. Tentu saja hal tersebut menimbulkan kekawatiran dari pihak pemerintah Jepang, sehingga membuat pemerintah Jepang untuk mengambil kebijakan untuk mencapai kepentingannya dalam hal agar tidak ada ancaman militer dari Cina.

### **Teori keamanan Nasional**

Menurut Frank N. Trager dan F.N. Simonis keamanan nasional memiliki arti:

*"The Preservation of a way of life acceptable to the people and compatible with the needs and legitimate aspiration of others. It includes freedom from military attack or coercion, freedom from internal subversion and freedom from the erosion of the political, economic and social values which are essential to the quality of life".<sup>13</sup>*

---

<sup>13</sup> Barry Buzan, *People, States and Fear, An Agenda for International Security Studies In The Post-Cold War Era*, MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall, Great Britain, 1991, hal. 17.

Keamanan wilayah territorial masing-masing negara dewasa ini menjadi sangat penting dalam mengantisipasi gangguan keamanan baik yang berasal dari dalam ataupun luar negeri. Konsep keamanan kini dapat dikaji sebagai pengaruh dari masing-masing posisi ekstrim antara kekuatan dan perdamaian. Menurut Barry Buzan, keamanan berkaitan dengan masalah kelangsungan hidup (*survival*). Berdasarkan kriteria isu keamanan, Buzan membagi keamanan kedalam lima dimensi, yaitu politik, militer, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tiap-tiap dimensi keamanan tersebut memiliki unit keamanan, nilai dan karakteristik *survival* dan ancaman yang berbeda-beda.<sup>14</sup>

Glen Snyder beranggapan bahwa kebijakan keamanan nasional meliputi dua konsep yaitu pertahanan dan penangkal dari lingkungan internasional. Snyder berpendapat:

*"Essentially deterrence means discouraging the enemy from making action by posing for him a prospect of cost and risk which outweighs his prospective gain. Defence means reducing our own prospective cost and risk in the even that deterrence fail. Deterrence works on the enemy's constitution: the deterrent value of military enemy moves. Defence value of military forces is their effect in mitigating the adverse consequences for us of possible enemy moves,*

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 21-23.

*whether such consequences are counted as losses of territory or war damage..*

*Perhaps the crucial difference between deterrence and defence is that deterrence is primarily a peacetime objective while defence is a war time value. Deterrence value and defence value are directly employed in different time periods".<sup>15</sup>*

Keamanan dan perdamaian tidaklah sempurna hanya dengan kebijaksanaan saja tetapi adanya peningkatan taraf ekonomi juga diperlukan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada sistem internasional sering membawa perubahan pada kebijakan suatu negara. Berakhirnya perang ideologis tidak dapat menghentikan persaingan antar negara untuk berkuasa, seperti halnya sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan. Masing-masing negara yang bersengketa ingin menguasai kawasan yang sangat potensial tersebut. Hal tersebut merupakan faktor *Eksternal* yang dapat mengancam Jepang baik dari segi Ekonomi maupun keamanan politik dan militernya.

Kesejahteraan ekonomi dan keamanan militer menjadi dasar bagi Jepang untuk mengambil kebijakan pertahanan keamanan terkait konflik Laut merupakan instrumen dari keamanan nasional (*national security* Cina Selatan karena kesejahteraan ekonomi dan keamanan militer).

---

<sup>15</sup> Douglas J. Murray and Paul R. Viotti, Op Cit, hal. XVIII



#### **E. ARGUMEN POKOK**

Dari berbagai uraian permasalahan yang dijelaskan di atas, penulis mengambil argumen pokok bahwa :

Dalam menjaga kepentingan negara terkait sengketa Laut Cina Selatan, Jepang melakukan berbagai kebijakan antara lain:

1. Kebijakan Jepang dalam mengamankan kepentingan Politik di Laut Cina Selatan
  - a) Menjaga stabilitas keamanan Laut Cina Selatan
  - b) Melakukan kerjasama dengan negara kawasan dan AS
  - c) Meningkatkan kekuatan di bidang pertahanan
2. Kebijakan Jepang dalam mengamankan kepentingan Ekonomi di laut Cina Selatan.
  - a) Mengamankan jalur Impor
  - b) Mengamankan jalur Ekspor
  - c) Kerjasama Ekonomi untuk menekan perkembangan Cina di Laut Cina Selatan.

#### **F. JANGKAUAN PENELITIAN**

Jangkauan penelitian dari tulisan ini dibatasi dari tahun 1992 sampai tahun 2012. Dimulainya angka tahun 1992 dikarenakan pada tahun

tersebut Cina memproklamasikan suatu hukum laut baru yang mengatur laut yurisdiksinya mencakup seluruh wilayah Laut Cina Selatan. Digunakannya angka tahun 2012 karena sampai pada tahun tersebut Permasalahan tersebut juga belum selesai. Namun tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk menuliskan data-data diluar tahun tersebut apabila diperlukan.

#### **G. METODE PENELITIAN**

Agar penyusunan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan sebuah metode penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian dibuat untuk menjawab dan membuktikan hipotesa. Dalam hal ini, metode merupakan suatu jalan yang harus di tempuh dan menjadikannya sebagai kerangka landasan yang diikuti agar tercipta pengetahuan ilmiah<sup>16</sup>. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara menghimpun data-data dari berbagai sumber informasi dan media masa untuk dianalisis dengan teori-teori yang bersumber pada literature yang di tulis oleh para pemikir politik.

---

<sup>16</sup> Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta, Kurnia Kalam Semesta, 2003, hal.1.

## **H. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuandari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjawab rumusan masalah dengan teori yang relevan danmembuktikan dugaan dengan data dan fakta serta mengetahui bagaimana Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang untuk menjaga stabilitas keamanan Negara terkait konflik Laut Cina Selatan.
2. Untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

## **I. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah :

1. Sebagai bahan tambahan pemikiran untuk Ilmu Hubungan Internasional terutama mengenai masalah kerjasama antara negara dan sebagai bahan pertimbangan untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya.
2. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menambah pengetahuan masyarakat mengenai permasalahan

tentang Kebijakan yang dilakukan pemerintah Jepang untuk menjaga keamanan Negara dalam hal ini terkait konflik laut Cina selatan

#### **J. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam skripsi ini, penulis akan membagi dalam 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan, yang berisi alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Kondisi Geografis, Sejarah, dan Sikap Jepang dalam konflik Laut Cina Selatan yang berisi tentang sejarah dan rentetan konflik di Laut Cina Selatan serta sikap Jepang dalam Konflik Laut Cina Selatan.

Bab III : Kebijakan Jepang Dalam Mengamankan Kepentingan Politik di Laut Cina Selatan yang berisi tentang apa saja kepentingan politik Jepang di Laut Cina Selatan serta kebijakan Jepang dalam Mengamankan kepentingan Politiknya

Bab IV : Kebijakan Jepang Dalam Mengamankan Kepentingan Ekonomi Terkait Konflik Laut Cina Selatan yang berisikan tentang apa saja kepentingan ekonomi Jepang di Laut Cina Selatan serta apa saja kebijakan Jepang dalam rangkamengamankan kepentingan Ekonominya

Bab V : Bab ini merupakan bab yang akan menutup karya tulis ini, berisi rangkuman dari bab sebelumnya serta disusun dalam bentuk kesimpulan.

**BAB II**

**KONDISI GEOGRAFIS, SEJARAH, DAN SIKAP JEPANG**

**DALAM KONFLIK LAUT CINA SELATAN**

Dalam bab ini akan menguraikan atau membahas tentang Laut Cina Selatan, mulai dari kondisi Geografis Laut Cina Selatan, Sejarah konflik Laut Cina selatan dan perkembangan konfliknya, serta sikap Jepang dalam konflik Laut Cina Selatan.

**A. Kondisi Geografis Laut Cina Selatan**

Penetapan batas-batas antar negara merupakan suatu hal yang bersifat konfliktual karena menyangkut masalah kedaulatan suatu negara. Maka tidak heran dengan banyaknya masalah-masalah yang timbul karena batas teritorial di dunia internasional sampai saat ini. Perbedaan pandangan dalam menentukan batas-batas negara dan sulitnya penentuan batas teritorial di laut menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Begitu pun yang terjadi di Kawasan Asia Tenggara, khususnya yang terjadi di Kepulauan Laut Cina Selatan.

Laut Cina Selatan adalah laut "semi tertutup" (*semi enclosed sea*) yang menghubungkan samudra hindia dan pasifik dan terletak diantara asia daratan dan

kepulauan.<sup>1</sup> Berbatasan dengan Cina dan Taiwan disebelah utara, sebelah barat ke selatan berbatasan dengan Vietnam, Kamboja, Muangthai atau Thailand dan Malaysia barat, sebelah timur berbatasan dengan Filipina dan Sebelah selatan Berbatasan dengan Indonesia timur, Malaysia timur dan Brunai Darussalam. Di Laut Cina Selatan sendiri terdapat empat kelompok gugusan kepulauan, dan karang-karang yaitu: Paracel, Spartly, Pratas, dan kepulauan Maccalesfield.<sup>2</sup> Di laut ini ada lebih dari 200 pulau dan karang yang diidentifikasi, kebanyakan darinya di daerah Kepulauan Spratly. Kepulauan Spratly tersebar seluas 810 sampai 900 km yang meliputi beberapa 175 fitur insuler yang diidentifikasi, yang terbesarnya menjadi Kepulauan Taiping (Itu Aba) yang panjangnya 1,3 km dan dengan ketinggian 3,8 m.

Secara geografis kawasan Laut Cina Selatan dikelilingi oleh Negara yang mempunyai laut (Cina dan Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina),

---

<sup>1</sup> Proyek Penelitian dan Pengembangan Politik Luar Negeri Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan Yayasan Pusat Studi Asia Tenggara, *usaha-usaha Mengalihkan Potensi Konflik di Laut Cina Selatan Menjadi Potensi Kerjasama*, Jakarta, Balitbang Deparlu RI, 1995, hal.1

<sup>2</sup> Asnani Usman & Rizal Sukma, *Konflik Laut Cina Selatan, Tantangan Bagi ASEAN*, Jakarta, CSIS, 1997, hal.1

serta negara tidak mempunyai laut yaitu Laos, dan *dependent territory* yaitu Macau. Luas perairan Laut Cina Selatan meliputi Teluk Siam yang dibatasi Vietnam, Kamboja, Thailand dan Malaysia serta Teluk Tonkin yang dibatasi Vietnam dan Cina. Kepulauan Spratly merupakan gugusan pulau-pulau kecil yang terletak di Laut Cina Selatan. Kepulauan ini terletak kurang lebih 1.100 Km dari pelabuhan Yu Lin (P.Hainan) Cina dan 500 Km dari pantai Kalimantan bagian Utara.karena letaknya yang strategis bagi pelayaran Internasional dan menyimpan kekayaan alam yang melimpah, kepulauan ini diperebutkan.<sup>3</sup>

Laut Cina Selatan mempunyai kekayaan alam yang sangat melimpah. Mengutip situs Beijing Review, data Kementerian Daratan dan Sumber Daya Cina menyebutkan, di wilayah itu terdapat kandungan cadangan minyak dan gas bumi yang sangat besar. Diprediksi, dasar Laut China Selatan menyimpan cadangan 55 miliar ton minyak bumi dan 20 triliun meter kubik gas bumi. Selain kandungan kekayaan alam tadi, Laut Cina Selatan juga lama dikenal sebagai salah satu jalur perdagangan laut paling strategis di dunia. Laut itu menghubungkan

---

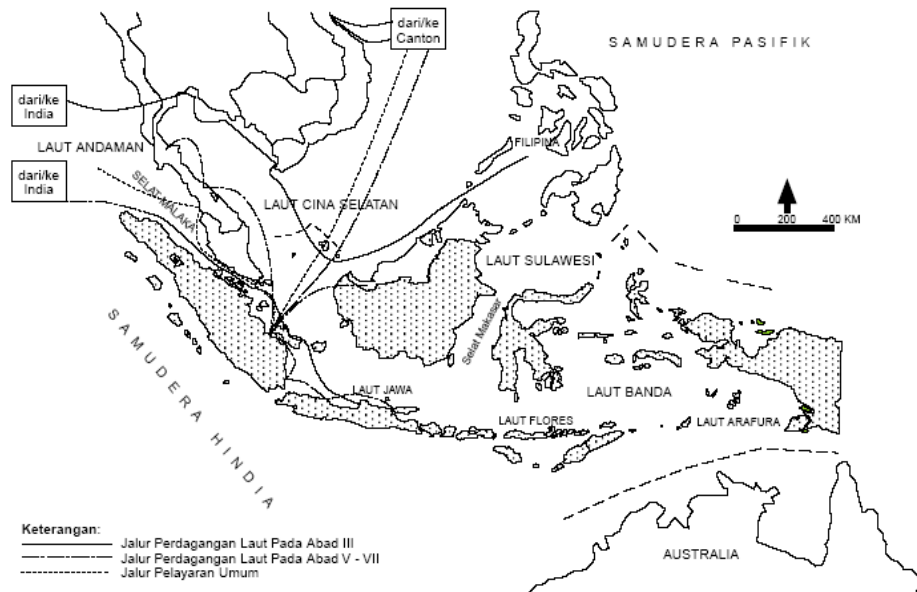
<sup>3</sup> "Laut Cina Selatan-Wilayah Sengketa,Beragam Nama," Dalam <http://www.anneahira.com/laut-cina-selatan.htm> Diakses pada 11 Juli 2012.



Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yang berarti juga menghubungkan jalur transportasi dan perdagangan antarkawasan, dari Eropa, Timur Tengah, dengan Asia Timur. Laut Cina Selatan terhubung dengan jalur-jalur perdagangan dan transportasi minyak utama dunia. Jumlah minyak bumi yang melewati Selat Malaka untuk terus ke Laut Cina Selatan adalah enam kali lebih banyak dari yang melewati Terusan Suez, dan 17 kali lebih banyak dari yang melewati Terusan Panama. Jepang sendiri, impor minyak mentahnya adalah melalui jalur ini.

Peta 2.1

Peta rute perdagangan yang melewati Laut Cina Selatan.

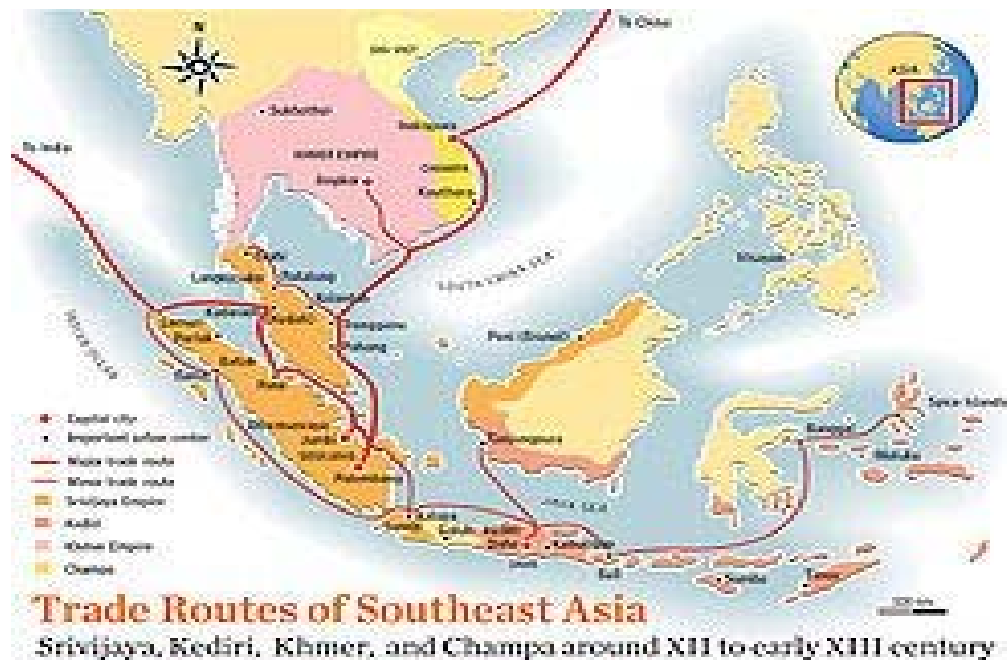


Sumber: "Kesibukan Laut Cina Selatan", dalam <http://belajar.kemdiknas.go.id/index3.php?display=view&mod=script&cmd=Bahan%20Belajar/Modul%20Online/SMP/view&id=119&uniq=all> diakses tanggal 5 November 2012.

Pada peta tersebut menunjukkan tingginya aktifitas perdagangan di kawasan Laut Cina Selatan. Tingginya aktifitas di Kawasan Laut Cina Selatan bahkan sudah terjadi dari abad ke III, ini menunjukkan pentingnya jalur Laut Cina Selatan dari berabad-abad yang lalu.

Peta 2.2

Peta Rute Perdagangan dari dan ke Jepang.



Sumber: "Japan oil Trade", dalam <http://www.eurasiareview.com/08022013-south-china-sea-energy-profile-critical-world-trade-route-and-potential-source-of-hydrocarbons-analysis/> diakses tanggal 5 November 2012.

Pada Peta tersebut digambarkan jalur perdagangan atau Ekspor-Import Dari dan ke Jepang melalui transportasi Laut, beberapa diantaranya adalah jalur

Impor Minyak dan Sumber Energi ke Jepang dari kawasan timur Tengah maupun Australia, Serta bahan baku industri dari Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya. Lalu rute Ekspor hasil industri dari Jepang ke negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Vietnam. Rute pelayaran Jepang semuanya melewati Kawasan Laut Cina Selatan, dan seperti yang tertera dal peta tersebut bahwa Laut Cina Selatan adalah jalur utama bagi Jepang untuk melakukan aktifitas atau kegiatan ekonominya.

Prinsip yang mengatur rezim laut lepas adalah prinsip kebebasan, namun demikian prinsip kebebasan ini harus pula dilengkapi dengan tindakan-tindakan pengawasan, karena kebebasan tanpa pengawasan dapat mengacaukan kebebasan itu sendiri, pengawasan itu dilakukan agar tercipta kebebasan-kebebasan yang harus mematuhi ketentuan, agar kepentingan-kepentingan negara yang terdapat dilaut lepas dapat terjamin.

Berdasarkan prinsip kebebasan ini, setiap negara yang berpantai ataupun tidak berpantai dapat menggunakan laut lepas dengan syarat mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh konvensi atau ketentuan-ketentuan Hukum Internasional. Berdasarkan pasal 87, kebebasan-kebebasan dilaut lepas antara lain:

1. Kebebasan berlayar ;
2. Kebebasan penerbangan ;
3. Kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut, dengan mematuhi ketentuan-ketentuan bab VI konvensi;
4. Kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi-instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional;
5. Kebebasan menangkap ikan dengan tunduk pada persyaratan yang tercantum dalam sub bab II ;
6. Kebebasan riset ilmiah dengan tunduk pada bab VI dan XIII ;

Bahwa dalam prinsip kebebasan ini tidak satu negarapun dapat menundukan kegiatan dilaut lepas dibawah kedaulatannya dan laut lepas hanya dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan damai. Dalam konvensi Jenewa 1958, laut pada intinya dibagi dalam 2 kawasan, yaitu kawasan teritorial dan laut lepas tidak satu negara pun yang dapat menuntut kedaulatan terhadap laut lepas. Pada laut lepas tidak satu negarapun yang dapat menuntut kedaulatan pada laut lepas karena terdapat prinsip kebebasan dilaut lepas, hal ini berartipenggunaanya terbuka untuk semua negara. Kebebasan yang dimaksud meliputi kebebasan berlayar,

menangkap ikan, penerbangan, dan kebebasan untuk meletakkan pipa dan kabel dibawah laut. Namun dalam melaksanakan kebebasan itu, negara diwajibkan untuk memperhatikan pelaksanaan kebebasan ini terhadap negara lain.<sup>4</sup>

### **B. Sejarah Konflik Laut Cina Selatan**

Laut Cina Selatan telah lama dianggap sebagai sumber utama ketidak stabilan tensi di Asia Timur. Mengatasi resiko untuk kemungkinan konflik diatas sengketa pengklaiman di Laut Cina Selatan telah menjadi tantangan yang signifikan dalam hubungan regional. Tantangan ini sekarang ditemui, sebagian besar melewati konsultasi diplomatik antara negara anggota ASEAN dan Cina. Secara khusus, upaya yang cukup besar telah dikeluarkan lebih dari dekade yang lalu dalam membangun sebuah pengendalian yang kooperatif untuk Laut Cina Selatan yang dapat membantu mengurangi potensi konflik yang telah lama muncul di wilayah tersebut.<sup>5</sup>

Besarnya jumlah Sumber Daya Alam yang terkandung di dalam Laut Cina Selatan menjadi salah satu penyebab

---

<sup>4</sup> Dr Agoes, et. Al, *Konvensi Hukum Laut 1982 dan Masalah Pengaturan Hak Lalu Lintas Kapal Asing*, Bandung, cv. Abidin, 1991. hal.

<sup>5</sup> Bateman, Sam, Ralf Emmers, *Security and International Politics in the South China Sea*, New York, Routledge, 2009. hal. 1.

timbulnya konflik banyak negara. Diduga landas Kontinen Laut Cina Selatan juga menyimpan cadangan minyak bumi. Di Kepulauan Spratly diprediksi terdapat gunung-gunung di di bawah permukaan laut, dimana muara sungai Mekong dan sungai-sungai lainnya tersimpan banyak minyak, sumber energy, pangan dan Sumber Daya Mineral lainnya.

#### 1. Latar Belakang Sengketa

Sengketa teritorial di kawasan Laut Cina Selatan khususnya sengketa atas kepemilikan Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel mempunyai perjalanan sejarah konflik yang panjang. Sengketa teritorial di kawasan laut Cina Selatan bukan hanya terbatas pada masalah kedaulatan atas kepemilikan pulau-pulau, tetapi juga bercampur dengan masalah hak berdaulat atas Landas Kontinen dan ZEE serta menyangkut masalah penggunaan teknologi baru penambangan laut dalam (dasar laut) yang menembus kedaulatan negara. Sengketa teritorial dan penguasaan kepulauan di Laut Cina Selatan, diawali oleh tuntutan Cina atas seluruh pulau-pulau di kawasan laut Cina Selatan yang mengacu pada catatan sejarah, penemuan situs, dokumen-dokumen Kuno, peta-peta, dan penggunaan gugus-gugus pulau oleh nelayannya. Menurut Cina, sejak 2000 tahun yang lalu, Laut Cina Selatan

telah menjadi jalur pelayaran bagi mereka. Beijing menegaskan, yang pertama menemukan dan menduduki Kepulauan Sparty adalah Cina, didukung bukti-bukti arkeologis Cina dari Dinasti Han (206-220 Sebelum Masehi). Namun Vietnam membantahnya, dan menganggap Kepulauan Sparty dan Paracel adalah bagian dari wilayah Kedaulatannya. Vietnam menyebutkan Kepulauan Sparty dan Paracel secara efektif didudukinya sejak abad ke 17 ketika kedua kepulauan itu tidak berada dalam penguasaan sesuatu negara.<sup>6</sup>

Dalam perkembangannya, Vietnam tidak mengakui wilayah kedaulatan Cina di kawasan tersebut, sehingga pada saat Perang Dunia II berakhir Vietnam Selatan menduduki Kepulauan Paracel, termasuk beberapa gugus pulau di Kepulauan Sparty. Selain Vietnam Selatan, Kepulauan sparty juga diduduki oleh Taiwan sejak Perang Dunia II dan Filipina tahun 1971. Sedangkan Filipina menduduki kelompok gugus pulau di bagian Timur kepulauan Sparty yang disebut sebagai Kelayaan. Tahun 1978 menduduki lagi gugus pulau Panata. Filipina menduduki kawasan tersebut karena kawasan itu merupakan tanah yang tidak sedang dimiliki oleh negara manapun.

---

<sup>6</sup> Lewis, Peter Young, The Potential for Conflict in South China Sea: (The Various Names Given to the Sparty), *Asian Defence Journal*, vol.11/no.95

Filipina juga menunjuk Perjanjian Perdamaian San Francisco 1951, yang antara lain menyatakan, Jepang telah melepaskan haknya terhadap Kepulauan Sparty, mengemukakan diserahkan kepada negara mana. Malaysia juga menduduki beberapa gugus pulau Kepulauan Sparty, yang dinamai Terumbu Layang. Menurut Malaysia, Langkah itu diambil berdasarkan Peta Batas Landas Kontinen Malaysia tahun 1979, yang mencakup sebagian dari Kepulauan Sparty. Dua kelompok gugus pulau lain, juga diklaim Malaysia sebagai wilayahnya yaitu Terumbu laksana diduduki oleh Filipina dan Amboyna diduduki Vietnam. Sementara Brunei Darussalam yang memperoleh kemerdekaan secara penuh dari Inggris 1 Januari 1984 kemudian juga ikut mengklaim wilayah di Kepulauan Spratly. Namun, Brunei hanya mengklaim perairan dan bukan gugus pulau.<sup>7</sup>

Klaim tumpang tindih tersebut mengakibatkan adanya pendudukan terhadap seluruh wilayah kepulauan bagian selatan kawasan Laut Cina Selatan. Sampai saat ini, negara yang aktif menduduki disekitar kawasan ini adalah Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Sementara Cina sendiri baru menguasai kepulauan tersebut pada tahun 1988, membangun konstruksi dan

---

<sup>7</sup> *ibid.*



instalansi militer serta menghadirkan militernya secara rutin di kepulauan tersebut.

Konflik senjata pertama kali terjadi di wilayah Laut Cina Selatan pada tahun 1974 yaitu antara Cina dan Vietnam. Kemudian yang kedua terjadi pada tahun 1988 yang dilatar belakangi oleh semakin intensifnya persaingan Cina-Vietnam di Indocina. Konflik senjata yang kedua antara Cina-Vietnam mempunyai arti penting karena selain menunjukkan supremasi Cina di Spratly, juga membawa dua perkembangan yang saling berhubungan yang mempunyai konsekuensi terhadap stabilitas kawasan ini di masa depan. Pertama, penegasan kembali klaim-klaim Cina dan Vietnam atas kepulauan Paracel dan Spratly. Kedua, meningkatnya militerisasi Cina, Vietnam, dan negara-negara pengklaim lainnya. Terjadinya bentrokan militer antara Cina dan Vietnam pada pada Maret 1988 tersebutlah yang menjadi pendorong utama militerisasi Laut Cina Selatan dalam upaya menegaskan dan mengamankan kawasan tersebut sampai saat ini kecuali Brunei darussalam, masing-masing pihak telah menentukan "*land base*" diantara gugusan pulau-pulau Spratly, sekaligus menempatkan tentaranya di kawasan itu secara tidak menentu. Beberapa posisi pendudukan Cina bahkan cukup jauh ke Selatan. Menurut

Cina, sejak 2000 tahun yang lalu Laut Cina Selatan telah menjadi jalur pelayaran bagi mereka.<sup>8</sup>

## 2. Sengketa Bilateral

Perebutan wilayah seputar Laut Cina Selatan semakin memanas, konflik-konflik bilateral juga tidak dapat dihindarkan. Sengketa Bilateral ini tidak dapat dianggap sepele, karena pada akhirnya akan menimbulkan ketegangan bagi negara-negara sekitarnya. Misalnya Sengketa antara Cina dan Vietnam. Sengketa dua negara ini dianggap yang paling lama, bahkan pernah berubah menjadi bentrokan senjata, pada tahun 1974 di Paracel. Konflik Cina-Vietnam ini juga dilator belakangnya persaingan strategis, baik dalam konteks Timur-Barat dalam kasus Cina-Vietnam Selatan, maupun dalam konteks persaingan regional, dalam kasus Vietnam (setelah bersatu) - RRC. Sengketa antara dua negara ini diperuncing dengan konflik teritorial mereka di wilayah lain.<sup>9</sup>

Konflik Malaysia-Filipina, berawal pada tahun 1979 ketika Malaysia menerbitkan Peta Baru dimana Landas Kontinennya mencakup wilayah dasar laut dan

---

<sup>8</sup> Asnani Usman, Rizal Sukma, *Op, Cit*, hal.7.

<sup>9</sup> A. Hasan Habib, *Kapita Selekta: Strategi dan Hubungan Internasional*, (Jakarta: CSIS, 1996), hlm.547.

gugusan karang di bagian selatan Laut Cina Selatan yang kemudian memicu timbulnya konflik kedua negara tersebut. Dalam konteks ASEAN, konflik Malaysia-Filipina mengalami hubungan pasang-surut, dan beberapa kali terjadi insiden yang menaikkan suhu politik dua negara. Konflik semakin memanas pada saat adanya usulan dari sejumlah politikus dan oposisi Filipina untuk memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Malaysia. Konflik bilateral juga terjadi pada negara Filipina dan Taiwan. Klaim dan kontra antara Filipina-Taiwan juga memperlihatkan situasi yang cukup rawan. Di Kepulauan Kalayan misalnya ternyata mengalami tumpang tindih diantara mereka. Wilayah yang paling dipertentangkan adalah Pulau Itu Abaa, yang oleh Filipina disebut Pulau Ligaw. Pada tahun 1988 Angkatan laut Filipina menahan 4 buah kapal nelayan Taiwan yang dituduh telah memasuki wilayah perairan Filipina di Kalayaan.<sup>10</sup>

Selain konflik Filipina-Taiwan, Filipina juga telah menghadapi beberapa kali pertentangan yang sengit dengan Cina yang berlangsung sejak tahun 1950-an. Hal ini bermula ketika sejumlah kalangan di Filipina mulai menunjukkan perhatiannya terhadap Spratly. Sementara

---

<sup>10</sup> "Konflik Laut Cina Selatan," Dalam <http://irjournal.webs.com/apps/blog/show/4113964-konflik-laut-cina-selatan> ,Diakses pada 10 September 2012.

itu media di Cina seringkali mengeluarkan artikel dan peringatan yang menegaskan kedaulatan Cina atas Spratly. Pada dasarnya sengketa Filipina-Cina di Spratly relatif lebih tenang dibandingkan misalnya, sengketa Vietnam-Cina. Walaupun Cina menentang pertanyaannya klain Filipina mulai melancarkan aksi pendudukan terhadap sejumlah pulau dan gugusan karang di Kalayaan. Hal ini nampaknya merupakan dampak dari usaha Cina untuk memperbaiki kedudukan geopolitisnya di Asia Pasifik dengan "*open door policy*" nya dalam menjalin hubungan dengan negara-negara kawasan. Namun dalam perkembangan terakhir, sengketa Filipina-Cina meningkat dengan adanya berita bahwa Cina telah menempatkan kapal perang dan membangun fasilitas baru di gugusan karang yang diklaim Filipina. Peselisihan dua negara ini semakin sukit dihindari pada 1995, ketika terjadi insiden di kawasan itu dimana militer Filipina membongkar bangunan Cina di Spratly. Pada saat yang bersamaan, Angkatan laut Filipina menangkap nelayan Cina sehingga hubungan Cina-Filipina semakin menegang.

Selanjutnya adalah sengketa antara Malaysia-Vietnam. Sebagai sesama anggota ASEAN, Malaysia dan Vietnam kerap kali berbenturan karena persoalan

pendudukan Vietnam terhadap beberapa wilayah Malaysia termasuk Terumbu layang-Layang. Secara fisik wilayah tersebut dikuasai oleh Vietnam. Sebaliknya pada tahun 1977 Malaysia menerbitkan peta baru. Lain halnya dengan sengketa Filipina-Vietnam di Spratly dimana terfokus pada cakupan 4 pulau atau gugusan karang yang kini dikuasai Vietnam yaitu (Southwest Cay) dalam bahasa tagalog adalah Pugad, Sin Cowe, Nam Yit, dan Sand Cay. Filipina menganggap keempat pulau itu sebagai bagian dari Kalayaan, yang diduduki secara tidak sah oleh Vietnam. Pada November 1999, terjadi ketegangan yang lebih besar antara dua negara ini, setelah pesawat pengintai Filipina ditembak pasukan Vietnam. Pesawat Filipina berkali-kali terbang diatas sejumlah pulau disemenanjung Spratly.<sup>11</sup>

Sementara itu Brunei yang merupakan satu-satunya pihak yang tidak mengklaim pulau Laut Cina Selatan, termasuk Spratly tetap saja mengalami konflik dengan Malaysia. Yaitu sengketa mengenai sebuah karang di sebelah selatan Laut Cina Selatan yang sewaktu pasang berada di bawah permukaan laut. Brunei mengklaim gugusan karang itu dan juga landas kontinen di

---

<sup>11</sup> Abdul Rivai Ras, *Konflik Laut Cina Selatan dan Ketahanan Regional Asia Pasifik*, (PT. Rendino Putra Sejati dan TNI AL: Jakarta, 2001), hlm.65.

sekitarnya. Sementara Malaysia pada 1979 mengklaim gugusan karang tersebut dan mendudukinya serta telah membangun mercusuar diatas gugusan karang tersebut. Sengketa antara kedua negara ini relatif tenang. Meskipun gugusan karang ini sebenarnya merupakan konflik multilateral, karena diklaim pula oleh Cina, Vietnam dan Taiwan. Konflik bilateral lainnya adalah antara Taiwan-Cina. Jika dilihat secara historis dari sisi politik teritorialnya, sesungguhnya tidak terdapat sengketa wilayah karena klaim Cina di Laut Cina Selatan sama dengan klaim Taiwan.<sup>12</sup>

### 3. Sengketa Multilateral

Pada perkembangan selanjutnya Filipina dan Malaysia juga mengklaim sebagian pulau di kawasan Spratly, sedangkan Brunei Darussalam mengklaim Louise Reef, gugusan karang yang terletak di luar gugus Spratly. Dalam masalah klaim multilateral, seringkali masalah klaim Cina, Taiwan dan Vietnam dibahas menjadi satu karena erat kaitannya dengan satu dengan lainnya, akibat perkembangan sejarah, misalnya antara Cina dan Taiwan, Vietnam Selatan, Vietnam Utara dan Vietnam setelah unifikasi. Cina sebenarnya merupakan satu-

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

satunya negara sampai Perang Dunia I yang mengklaim kedaulatan sepenuhnya atas seluruh Kepulauan Spratly, dengan mendasarkan klaimnya atas penemuan pertama. Masalah kedaulatan menjadi masalah yang sensitif antara Prancis, Inggris dan Jepang pada akhir abad 19, padahal pada tahun 1876 Cina telah menyatakan bahwa kepulauan Spratly merupakan miliknya.

Saling Klaim juga dilakukan beberapa negara lainnya, antara lain; Taiwan mengklaim dan menduduki kembali (1956) kelompok kepulauan ini dengan menempatkan satu garnisiun berkekuatan 600 tentara secara permanen di pulau terbesar, yaitu Itu Aba (Taiping dalam bahasa Cina), serta membangun landasan pesawat dan instalasi militer lainnya. Vietnam Selatan kembali menegaskan haknya atas kepulauan Spratly dan Paracel pada 1951 dalam konferensi Sanfrancisco. Bahkan setelah unifikasi, Vietnam menegaskan kembali tuntutannya atas kedua kepulauan tersebut pada berbagai kesempatan, dan vietnam secara teratur mengadakan patroli di sekitar Paracel.

Berbeda dengan ketiga negara sebelumnya, Filipina tidak mengklaim seluruh kepulauan Spratly dan tidak juga didasarkan atas alasan sejarah. Filipina pertama menyatakan klaimnya apada tahun 1946 di Majelis

Umum PBB dan diulang lagi pada tahun 1950 ketika Taiwan menarik pasukannya. Meskipun Filipina lebih belakangan menyatakan klaimnya atas gugusan Spratly, namun negara ini telah awal melakukan pendudukan militer, membuat landasan terbang dan menempatkan militer di kepulauan itu. Enam pulau yang diduduki Filipina merupakan pulau-pulau terbesar di kepulauan itu. Sementara itu Malaysia baru kembali mengklaim pada tahun 1979 atas 11 pulau karang di bagian Tenggara Kepulauan Spratly berdasarkan pemetaan yang dilakukannya. Dan pada tahun 1983 melakukan survey dan menyatakan kepulauan tersebut berada di perairan Malaysia. Dan Brunei Darussalam adalah yang terakhir menyatakan klaimnya atas sebagian kawasan Spratly. Klaim Brunei hampir serupa dengan Malaysia karena didasarkan pada doktrin Landas Kontinental, akan tetapi garis-garis batas ditarik secara tegak lurus dari dua titik ekstrem di garis pantai Brunei darussalam.<sup>13</sup>

### **C. Perkembangan Konflik Laut Cina Selatan**

Setelah meredup beberapa tahun, pada tahun 2009, perhatian terhadap konflik di Laut China Selatan ini

---

<sup>13</sup> Rizal Sukma, "Militer Filipina Bongkar Bangunan Cina di Spratly", *Kompas*, 24 Maret 1995.



meningkat, karena salah satu dari negara yang bersengketa, yaitu Tiongkok mengajukan secara resmi peta wilayah teritorialnya kepada PBB yang meliputi seluruh kepulauan Paracel dan Spratly dan lautan sekitarnya. Wilayah tersebut adalah wilayah yang masih dalam sengketa. Peta baru tersebut tetap memasukkan sebagian wilayah laut ZEE Indonesia yang terletak di utara kepulauan Natuna Besar kedalam wilayah teritorial laut Tiongkok.

Pada bulan Juli 2011 Filipina mengeluhkan bahwa kapal-kapal Cina mengganggu kegiatan atau aktifitas syah nelayan Filipina, merongrong stabilitas keamanan dan perdamaian kawasan tersebut. Filipina mengeluh bahwa kapal-kapal Cina menurunkan bahan bangunan dan mendirikan tiang tanda di atas karang sebelah Barat pulau Filipina, Palawan, yang jelas masuk dalam zona *ekonomi eksklusif* (ZEE) Manila. Namun Cina menilai bahwa pernyataan Filipina tersebut tidak bertanggung jawab, Cina mengatakan kepada Filipina agar berhenti merusak hak dan kepentingannya dengan keluhan tentang kegiatan Cina di Laut Cina Selatan. Selain itu, Cina menyatakan bahwa kapal-kapal China sedang melakukan penelitian ilmiah di perairan yurisdiksi Cina dan bertindak sesuai dengan hukum. Menteri Pertahanan

Filipina, Voltaire Gazmin mengatakan Beijing akan "kehilangan muka" jika pihaknya terus bertindak agresif di kawasan yang disengketakan, setelah Menteri Pertahanan Cina Liang Guanglie dalam KTT Keamanan Asia akhir pekan lalu mengatakan, Cina menginginkan perdamaian dan stabilitas di kawasan.<sup>14</sup>

Laut Cina Selatan kini telah menjadi salah satu *flash point* di kawasan Asia Pasifik. Sengketa wilayah di perairan itu bukan saja melibatkan enam negara yaitu Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei dan Malaysia, tetapi juga menyangkut kepentingan kekuatan besar di kawasan seperti Amerika Serikat. Akibatnya, sengketa wilayah di Laut Cina Selatan kini tidak lagi sebatas saling klaim wilayah dan perebutan sumberdaya alam, tetapi sudah merambah pula pada isu kebebasan bernavigasi.

Dalam perkembangan terakhir, sengketa Laut Cina Selatan telah mempengaruhi perubahan kebijakan pertahanan Amerika Serikat secara global dan hal ini dapat mempengaruhi kebijakan pertahanan Jepang dimanaprioritas utama pertahanan Amerika Serikat saat

---

<sup>14</sup> "China Peringatkan Filipina Atas Sengketa Laut China Selatan.", dalam <http://www.swatt-online.com/2011/06/china-peringatkan-filipina-atas-sengketa-laut-china-selatan/>, diakses tang 31 Oktober 2012.

ini dan ke depan adalah di kawasan Pasifik. Sebagai implementasi kebijakan tersebut.<sup>15</sup>

#### **D. Sikap Jepang Dalam Konflik Laut Cina Selatan**

Sikap Jepang yang aktif ini membuat Jepang untuk selalu menyerukan perdamaian di Laut Cina Selatan. Dalam waktu dekat ketegangan bisa meningkat dari waktu ke waktu menjadi konflik yang lebih besar yang mengganggu lalu lintas maritim Jepang. Ini merupakan berita buruk bagi keamanan ekonomi Jepang, sejak jalur Laut Cina Selatan digunakan oleh Jepang untuk membawa barang-barang Jepang ke pasar yang menguntungkan di Asia Tenggara dan Eropa, dan 90% dari impor minyak mentah Jepang minyak melewati perairan tersebut. Selain itu, apabila Cina menguasai dan mendominasi Laut Cina Selatan akan sangat membahayakan Jepang bahkan hal terburuk yang akan terjadi adalah menimbulkan konflik baru antara Jepang dengan Cina.

Ini menjelaskan tekad Jepang untuk memainkan peran utama dalam mengelola krisis Laut Cina Selatan dan menggunakan forum multilateral sebagai salah satu

---

<sup>15</sup> "Pengaruh Keamanan Regional Bagi Keamanan Nasional Indonesia (Kasus Sengketa Laut Cina Selatan)", dalam <http://budisusilosoepondji.wordpress.com/2012/05/23/pengaruh-keamanan-regional-bagi-keamanan-nasional-indonesia-kasus-sengketa-laut-cina-selatan/>, diakses pada 31 Oktober 2012.

cara untuk memainkan peranya tersebut. Jepang telah melakukan pertemuan puncak dengan ASEAN untuk menyerukan "perdamaian dan stabilitas" di laut. Lebih jauh lagi, mereka telah sepakat untuk memperkuat kerjasama antara *Japan Coast Guard* dan rekan-rekan di Asia Tenggara.

Sikap Jepang yang terlihat tidak mendukung Cina ini ditunjukkan dengan kerjasama yang dilakukan oleh Jepang dengan negara-negara tersebut, salah satunya yaitu dengan Filipina. Jepang, Australia dan Filipina bekerjasama untuk mencari resolusi damai untuk masalah sengketa Laut Cina Selatan, mereka mempunyai kebijakan yang sejalan untuk bekerjasama dan mencari penyelesaian aturan berbasis sengketa wilayah. Pada saat yang sama, Angkatan Laut Filipina dan Vietnam sepakat untuk berbagi informasi dan membentuk *hotline* antara penjaga pantainya.<sup>16</sup>

Sebenarnya Jepang tidak sepenuhnya puas bekerja hanya melalui ASEAN. Jepang semakin frustrasi pada ketidakmampuan ASEAN untuk mengelola krisis tersebut, meskipun terus menyuarkan dukungan kuat bagi upaya

---

<sup>16</sup> "Filipina Bekerjasama Dengan Jepang, Australia di spartly", dalam [http://apdforum.com/en\\_GB/article/rmiap/articles/online/features/2012/01/05/vietnam-australia-philippines](http://apdforum.com/en_GB/article/rmiap/articles/online/features/2012/01/05/vietnam-australia-philippines), diakses pada 15 November 2012.

organisasi. Jepang ingin memastikan bahwa ASEAN berdiri bersatu dan menentang setiap anggotanya yang menentang setiap kesepakatan dengan China.

Jadi Jepang juga akan terus melakukan kerjasama bilateral dengan beberapa mitra di wilayah tersebut. Jepang telah mencapai sebagian besar Filipina, yang dinilai sebagai negara terlemah untuk militernya di ASEAN. Tokyo kini memperkuat kemampuan *Filiphina Coast Guard*, dan telah setuju pada prinsipnya untuk mentransfer hingga 10 kapal patroli untuk meningkatkan kapabilitas pengawasan maritimnya. Kedua belah pihak juga telah mulai meningkatkan hubungan militer. Dialog reguler sudah dimulai, dan tahun ini kapal angkatan laut Jepang telah mengunjungi Filipina untuk ikut bekerjasama dalam pertukaran pelatihan dan misi kemanusiaan. Selain Filipina, Jepang telah sepakat untuk meningkatkan hubungan pertahanan dengan Vietnam dan aktif dalam diskusi dengan Singapura, Malaysia dan Indonesia.

### **BAB III**

#### **KEBIJAKAN JEPANG DALAM MENGAMANKAN KEPENTINGAN POLITIK DI LAUT CINA SELATAN**

Konflik Laut Cina selatan mempunyai kaitan yang sangat erat dengan Jepang, mengingat Jepang mempunyai kepentingan yang sangat besar di kawasan Laut Cina Selatan. Terlebih lagi salah satu dari negara yang mengklaim kawasan tersebut adalah negara yang menjadi rival utama bagi Jepang di berbagai bidang yaitu Cina.

Ada dugaan bahwa Cina merasa sebagai satu-satunya aktor di Laut Cina Selatan dan akan menentang setiap kehadiran kekuatan lain di kawasan tersebut. Jepang dengan kekuatan globalnya secara tradisional sudah hadir di Laut Cina Selatan, termasuk Asia Tenggara, karena mempunyai kepentingan yang sangat besar di kawasan ini, tentunya tidak mau kehilangan supremasinya diambil alih oleh Cina sebagai saingan utama Jepang. Apalagi sampai Laut Cina Selata dikuasai oleh Cina, ini tentunya akan menjadi berita yang sangat buruk karena akan sangat membahayakan Jepang nantinya. Dalam bab ini akan mengulas bagaimana kebijakan-kebijakan Jepang dalam mengamankan kepentingan politiknya terkait sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan.

### **A. Menjaga Stabilitas Keamanan Laut Cina Selatan**

Keamanan dan keselamatan jalur pelayaran (*sea lanes of communication*) SLOC yang melewati Laut Cina Selatan, akhir-akhir ini mulai terusik sehubungan dengan potensi konflik yang selama berpuluh tahun terpendam, mulai muncul ke permukaan. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, mulai dari politik, ekonomi, pertahanan, hukum internasional dan lain-lain, ditambah dengan banyaknya aktor yang terlibat di dalamnya. Apabila dikaji secara mendalam, ancaman terhadap keamanan dan keselamatan di jalur pelayaran tersebut hanyalah akibat dari pertikaian masalah kepemilikan terhadap dua buah gugusan pulau (kepulauan) yang berlokasi di Laut Cina Selatan, yaitu Kepulauan Spratly dan Paracel.<sup>1</sup>

Dalam hal ini setiap negara mempunyai kepentingan nasional, kepentingan nasional inilah yang menjadi dasar bagi tiap negara untuk melakukan klaim di kawasan Laut Cina selatan mengingat potensi Laut Cina Selatan ini yang begitu besar dan menjanjikan. Dalam klaim di wilayah Laut Cina Selatan ini bahkan tidak hanya dilakukan oleh dua atau tiga negara saja, ini

---

<sup>1</sup> Willy F. Sumakul, " Potensi Konflik Laut Cina Selatan", dalam <http://www.fkpmaritim.org/?p=250>, diakses tanggal 7 November 2012.

menyebabkan penyelesaian sengketa laut tersebut semakin sulit untuk diselesaikan. Tujuan klaim dari para *claimants* ini bukanlah untuk memiliki kepulauan tersebut dan kemudian memindahkan penduduknya ke pulau-pulau tersebut, melainkan karena faktor ekonomi semata, yakni perebutan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam yang dipercaya sangat banyak terdapat di kawasan tersebut. Seiring dengan kemajuan dan kemakmuran ekonomi negara-negara Asia dewasa ini seperti Cina, Vietnam, Malaysia, maka diperlukan eksploitasi sumberdaya alam dari laut untuk tambahan devisa negaranya.

#### 1. Keikutsertaan Jepang dalam ASEAN Regional Forum (ARF)

Sebagai upaya untuk mengamankan kepentingannya, maka Jepang berusaha untuk meningkatkan perannya dalam bidang Politik dan keamanan, hal ini ditunjukkan dengan masuknya Jepang dalam forum kerjasama Asean Regional Forum (ARF). Dalam ARF disamping motif kerjasama ekonomi, dorongan lainnya terkait dengan motif politik dan keamanan. Kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur adalah kawasan yang rawan dengan konflik baik itu dalam tataran *Interstate* maupun *Intrastate*. Konflik Laut Cina



Selatan adalah salah satu contoh kasus. Forum kerjasama Asean Regional Forum memungkinkan anggotanya untuk mengadakan dialog untuk membahas masalah yang sedang dihadapi bersama. Negara anggota ARF mencakup 27 negara yang secara geopolitik sangat berpengaruh di kawasan Asia Pasifik, yaitu 10 negara ASEAN, Amerika Serikat, Australia, Bangladesh, Tiongkok, India, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Korea Utara, Mongolia, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Selandia Baru, Sri Lanka, Timor Leste dan Uni Eropa. Dalam kaitanya dengan Konflik Laut Cina Selatan, ARF dapat dimanfaatkan oleh anggotanya, khususnya Jepang untuk menghindari rivalitas antar negara dan sekaligus untuk menghindarkan kemungkinan campur tangan pihak luar terhadap kawasan Asia Pasifik.

Pada 6 Oktober 2011 diselenggarakan ASEAN Regional Forum Senior Official's Meeting sebelum terselenggaranya ASEAN Regional Forum di Bali. Isu-isu yang dibahas pada ARF SOM antara lain mengenai keamanan tradisional dan non tradisional, terorisme, denuklirisasi, human trafficking, isu Laut China Selatan serta perkembangan kondisi di Timur Tengah, Afrika Utara, Myanmar dan Fiji. Khusus mengenai isu Laut China Selatan, secara aklamasi peserta ARF

menghendaki penyelesaian secara damai dan mengedepankan dialog. Selain itu, mereka juga mendorong percepatan implementasi Declaration on the Conduct of Parties (DOC) serta terbentuknya Code of Conduct (COC). Untuk membuat forum ARF lebih efektif dan efisien dalam memberikan kontribusi signifikan di kawasan, disetujui untuk saling memperkuat hubungan antara ARF dengan APEC, East Asia Summit, ASEAN Defense Military Meeting dan ASEAN Plus Three (ASEAN, Tiongkok, Korea Selatan dan Jepang). Di awal pertemuan ARF SOM dimulai, ketua delegasi Jepang menyampaikan ucapan terima kasih kepada peserta ARF atas dukungan yang diberikan kepada Jepang yang tertimpa bencana alam pada bulan Maret silam. Sebagai Ketua ARF tahun ini, Indonesia menyatakan ARF akan selalu mendukung proses pemulihan Jepang.<sup>2</sup>

Pada Minggu ketiga bulan Juli 2011 di gelar ASEAN Regional Forum di Bali yang secara khusus membahas isu sengketa Laut Cina Selatan. Jepang sebagai pihak yang bergantung atas keamanan jalur energi dan pelayaran mereka melalui televisi mereka, *NHK* dengan

---

<sup>2</sup> " Semangat Berdialog dan Bekerjasama Dikedepankan Dalam ARF", dalam [http://asean2011.kemlu.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=392%3Asemangat-berdialog-dan-bekerjasama-dikedepankan-dalam-arf&catid=86%3Ahardnews&Itemid=109&lang=en](http://asean2011.kemlu.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=392%3Asemangat-berdialog-dan-bekerjasama-dikedepankan-dalam-arf&catid=86%3Ahardnews&Itemid=109&lang=en) diakses tanggal 22 Februari 2013.

mengutip informasi diplomat menyatakan Cina mempersiapkan draft *code of conduct* (COC) dalam pertemuan dengan para pemimpin Asean. Dalam Asean Summit sebelumnya, Jepang dan para pemimpin negara-negara Asia Tenggara telah meminta Cina untuk meningkatkan status Declaration on the Conduct (DOC) Laut Cina Selatan yang diteken pada 2002 menjadi Code of Conduct (COC) sehingga menjamin keamanan wilayah tersebut. Informasi hampir serupa juga diluncurkan kantor berita *Kyodo* yang menyebut, draft komunike yang membahas kegiatan militer, eksplorasi migas, keamanan navigasi dan penerbangan di Laut Cina Selatan tengah disiapkan para pemimpin ASEAN.<sup>3</sup> Pada 12 Juli 2012 diselenggarakan ASEAN Regional Forum di Phnom Penh dengan upaya-upaya untuk menurunkan ketegangan di Laut Cina Selatan menjadi Dominasi pembahasan.

## 2. Melakukan Patroli Gabungan di Laut Cina Selatan

Dalam perkembangan terkini, Amerika Serikat bersama Jepang telah melemparkan gagasan patroli gabungan di Laut Cina Selatan. Tujuan dari patroli ini secara resmi adalah untuk mencegah sengketa di sana.

---

<sup>3</sup> "Mencari resolusi untuk Laut China Selatan", dalam <http://www.bisnis-kepri.com/index.php/2011/07/mencari-resolusi-untuk-laut-china-selatan/> diakses tanggal 22 Februari 2013.

Sedangkan tujuan tidak resmi tidak lain adalah untuk menangkal Cina yang semakin asertif di perairan strategis tersebut. Gagasan patroli gabungan di Laut Cina Selatan sekarang sudah mulai dipasarkan ke negara-negara di kawasan yang "berhadapan" dengan Cina. Termasuk Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya, yang sudah pasti tidak melewati Singapura. Di samping itu, sekutu baru Washington di Samudera India yaitu India juga telah dilemparkan dengan penawaran patroli bersama.

Peningkatan kehadiran kapal perang di sana merupakan pilihan yang realistis. Pilihan itu juga memberikan keuntungan kepada negara-negara Asia Tenggara, yaitu agar Cina tidak sewenang-wenang bertindak di kawasan Asia Tenggara. Patroli gabungan di Kawasan Laut Cina Selatan sangat berpengaruh terhadap keamanan kawasan. Dengan dilakukannya patroli gabungan maka konflik terbuka di Laut Cina Selatan akan semakin dapat dicegah atau diminimalisir.

#### **B. Melakukan Kerjasama Keamanan Dengan Negara Kawasan dan AS**

Dalam menjaga eksistensinya, suatu negara harus menjalin hubungan dengan negara lain termasuk Jepang.

Mengingat sejarah pemerintahan Jepang pada masa lalu, Jepang pernah melakukan politik Isolasi yang telah dinilai tidak membawa Jepang pada suatu keberhasilan. Hingga pada tahun 1867-1868 Jepang kembali bangkit dan membuka diri untuk menghapus sistem politik Isolasinya, hingga kini Jepang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan Jepang yang sangat pesat tersebut tidak lepas dari kerjasama yang dilakukan Jepang dengan negara lain.

Kemajuan yang didapat oleh Jepang salah satunya adalah dikarenakan kemajuan ekonomi Jepang yang berkembang sangat pesat, Jepang banyak melakukan ekspor-impor dengan negara lain. Untuk mempertahankan eksistensi negaranya maka Jepang harus menjaga kekuatan ekonominya, salah satunya adalah menjamin kelancaran aktifitas ekonominya. Untuk itu Jepang harus menjaga hubungan baik dengan negara lain seperti melakukan kerjasama ekonomi, politik dan Keamanan.

#### 1. Kerjasama Dengan Amerika Serikat

Kerjasama antara Jepang dengan Amerika Serikat sudah terjadi sejak lama, dalam Konstitusi Jepang 1947 yang disusun setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, pada Pasal 9 dinyatakan bahwa,

*"Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as a means of settling international disputes. In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerence by the state will not be recognized".*

Karena konstitusi melarang adanya Angkatan Bersenjata, pada 1948 pemerintah Jepang di bawah supervisi otoritas pendudukan Amerika Serikat mendirikan *Maritime Safety Agency*, yang merupakan pendahulu *Japan Maritime Self Defense Force* (JMSDF). Pecahnya Perang Korea pada 1950 menyebabkan para perencana militer Amerika Serikat melibatkan JMSDF untuk membantu Armada Ketujuh, khususnya untuk operasi penyapuan ranjau. Operasi kapal-kapal penyapu ranjau Jepang dalam Perang Korea dilaksanakan di bawah komando dan kendali operasional Armada Ketujuh Amerika Serikat.

Setelah kedaulatan Jepang dipulihkan kembali oleh Amerika Serikat pada 1952, selain JMSDF juga dibentuk *Japan Ground Self Defense Force* (JGSDF) dan *Japan Air Self Defense Force* (JASDF). Ketiga matra Pasukan Bela Diri tersebut berada di bawah Badan Pertahanan Jepang yang berada di dalam Kantor Perdana Menteri Jepang.

Kerjasama keamanan Jepang Amerika Serikat merupakan hubungan kerjasama pertahanan yang paling erat dan paling menguntungkan bagi kedua belah pihak, namun dibalik hubungan itu terdapat persaingan di bidang ekonomi.<sup>4</sup>Perkembangan situasi internasional pasca perang dingin yang tidak menentu sangat berdampak pada kebijakan pertahanan Jepang dan mendorong Jepang untuk melakukan kerja sama lebih intensif dengan Amerika Serikat dalam bidang pertahanan. Jepang dan Amerika Serikat menandatangani "*Japan-United States Joint Declaration on Security*" dalam pertemuan *Japan United States summit* pada bulan April 1996 di Tokyo, Jepang.<sup>5</sup>

Pada tahun 1997 Jepang dan Amerika Serikat sepakat menandatangani kerjasama "*The Guideline for Japan-United States Defence Cooperation*" yang melingkupi kerjasama dari berbagai sudut pandang situasi Internasional, terutama di kawasan Asia pasifik dan lebih luas lagi di luar kawasan.

Presiden Amerika Barack Obama dan Perdana Menteri Jepang Yoshihiko Noda mengeluarkan pernyataan bersama yang menyebut Asia Pasifik menghadapi tantangan

---

<sup>4</sup> Takashi Inoguchi, *Kemacatan Dalam Permasalahan Kontinen dan Gangguan-Gangguan Struktural di Pasifik Barat*, dalam Robert A, Scalpin, *Masalah Keamanan Asia*, CSIS, Jakarta, 1990, hal. 86.

<sup>5</sup> *Defence of Japan 2005, Inter group*, Tokyo, 2005, hal. 142.

di tengah perubahan lingkungan internasional. Persekutuan Amerika dan Jepang sangat penting bagi keamanan Jepang serta perdamaian, keamanan, dan kemakmuran ekonomi di kawasan ini. Barack Obama dalam jumpa pers se usai pertemuan mengatakan, kedua pihak juga berkomitmen untuk memperdalam hubungan perdagangan dan investasi, menjaga stabilitas kawasan, meningkatkan kerja sama bidang keamanan nuklir, energi bersih, dan keamanan internet. Kedua pihak juga sedang berusaha untuk membentuk peraturan internasional demi memelihara kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, Barack Obama menegaskan akan memainkan kemitraan global dengan Jepang untuk memelihara perdamaian, keamanan, dan HAM internasional, serta meningkatkan hubungan people-to-people antara Amerika dengan Jepang.<sup>6</sup>

Pada Januari 2011, Cina memperlihatkan pesawat siluma J20 dan melakukan uji coba bersama Angkatan Lautnya di Laut Cina Selatan. Tentu hal ini akan memprovokasi negara-negara pengkalim lainnya di Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, Jepang bersama Amerika Serikat, melakukan latihan perang di Laut Cina Selatan. Lebih lanjut Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan,

---

<sup>6</sup> "AS dan Jepang Intensifkan Kerja Sama Hankam", dalam <http://indonesian.cri.cn/201/2012/05/01/1s127331.htm>, diakses tanggal 11 November 2012.



pasukan Bela Diri Maritim Jepang akan mengirim kapal perusak Shimakaze untuk bergabung dengan kapal perusak Angkatan Laut AS dan satu kapal patroli Angkatan Laut Australia untuk latihan komunikasi dan latihan lainnya di lepas pantai Brunei Darussalam. Itu merupakan latihan gabungan militer pertama di Laut Cina Selatan, yang sebagian besar diklaim Cina sebagai wilayah maritimnya, tetapi beberapa negara Asia tenggara juga mengklaim sebagian wilayah perairan itu.<sup>7</sup>

Latihan itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan taktis Pasukan Bela Diri Maritim Jepang dan memperkuat hubungan dengan angkatan laut negara-negara peserta, kata kementerian Jepang dalam satu pernyataan. Ketegangan di Laut Cina Selatan yang strategis dan kaya sumber alam itu meningkat semakin meningkat, dengan Filipina dan Vietnam menyatakan kecemasan mereka atas apa yang mereka sebut aksi militer Cina yang meningkat di sana.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> "Angkatan Laut AS, Jepang Dan Australia Akan Latihan Militer Di Laut China Selatan", dalam [http://www.theglobal-review.com/content\\_detail.php?lang=en&id=5326&type=8#.US7vIWc4lqg](http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=en&id=5326&type=8#.US7vIWc4lqg) diakses tanggal 25 Februari 2013.

<sup>8</sup> *Ibid.*

## 2. Kerjasama Jepang-India

Jepang dan India adalah kedua negara yang mempunyai kepentingan yang sama besar di Laut Cina Selatan. Sehingga stabilitas keamanan di Laut Cina Selatan menjadi hal yang sangat penting baik bagi India maupun Jepang. Kerjasama antar Jepang dengan India sudah terjalin lama, Jepang dan India melakukan kerjasama di berbagai bidang, baik Ekonomi, Politik, maupun Keamanan, salah satunya kerjasama maritim untuk menjamin kelancaran di Laut Cina Selatan dan untuk menekan perkembangan Cina di Asia Tenggara.

Saat menegangkan timbul pada tanggal 22 Juli 2011 ketika Kapal AL India Airavat terlibat insiden di Laut Cina Selatan ketika berlayar dari Pelabuhan Nha Trang, Vietnam, menuju Hai Phong, dimana kapal akan berlabuh. Empat puluh lima mil laut (83 km) dari pesisir Vietnam di Laut Cina Selatan, pemanggil yang menyatakan dirinya sebagai 'AL Cina' menghubungi lewat saluran terbuka dan berkata, "kalian memasuki perairan Cina".<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> "India ganti taktik terkait Laut Cina Selatan", dalam <http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/online/features/2012/12/11/india-sea-tactics> diakses tanggal 25 Februari 2013.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri Jepang dengan menteri Luar Negeri India melakukan pertemuan yang mencatat bahwa kerjasama antara Jepang dan India di bidang keamanan maritim telah terus diperdalam, mengacu pada latihan gabungan antara *Japan Coast Guard* dan *India Coast Guard*, kerjasama bilateral pada anti-pembajakan kegiatan di Teluk Aden dan lepas pantai Somalia, serta latihan angkatan laut bersama antara Maritime Self-Defense Force dan Angkatan Laut India dijadwalkan akan digelar tahun ini. Kedua menteri memutuskan untuk membangun dialog tingkat kerja pada isu-isu maritim yang mencakup berbagai isu maritim dengan fokus pada keamanan maritim, dalam rangka untuk lebih mengembangkan kerjasama antara Jepang dan India di daerah ini.<sup>10</sup>

Pasukan Angkatan Laut Bela Diri Jepang (JMSDF) dan Angkatan Laut India melakukan latihan bersama di Teluk Sagami, Prefektur Kanagawa. Jepang dan India berpartisipasi dalam latihan multilateral sebelumnya. Menurut media lokal, empat kapal Angkatan Laut India telah dikirim ke Jepang, termasuk kapal perusak, kapal pasokan, kapal fregat dan korvet. Semua kapal itu telah

---

<sup>10</sup> "Visit to India by Minister for Foreign Affairs Koichiro Gamba (Overview)", dalam [http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/india/meeting1204\\_fm.html](http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/india/meeting1204_fm.html) diakses tanggal 19 November 2012.

tiba di pangkalan Yokosuka JMSDF. Pihak JMSD mengerahkan dua kapal perusak MSDF, sebuah pesawat penyelamat dan helikopter patroli untuk berpartisipasi dalam latihan satu hari itu. Kedua belah pihak akan melaksanakan pelatihan formasi dan menyelamatkan kapal sipil.<sup>11</sup>

Perdana Menteri India, Manmohan Singh melakukan kunjungan empat hari ke Jepang untuk membahas kerja sama keamanan maritim dan dunia maya dengan Perdana Menteri Yoshihiko Noda, Singh tiba di Jepang pada 15 November 2012, dan melakukan pertemuan bilateral pada 16 November 2012. Kedua pemimpin bertukar pandangan mereka mengenai penguatan hubungan strategis antara Jepang dan India dalam keamanan maritim dan hubungan ekonomi. Tahun 2012 menandai ulang tahun ke-60 pembentukan hubungan diplomatik antara kedua negara. Dia berharap kunjungan ini akan mempererat kerja sama antara kedua pihak untuk menjaga stabilitas keamanan di

---

<sup>11</sup> "Angkatan Laut Jepang-India gelar latihan bersama", dalam <http://www.antaraneews.com/berita/314400/angkatan-laut-jepang-india-gelar-latihan-bersama> diakses tanggal 20 November 2012.

Laut Cina Selatan. Singh juga akan bertemu Kaisar Akihito dan Permaisuri Michiko selama kunjungan.<sup>12</sup>

### 3. Kerjasama Jepang-Indonesia

Indonesia merupakan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dan berdekatan dengan kawasan Laut Cina Selatan. Posisi Indonesia di Laut Cina Selatan hampir sama dengan Jepang, Indonesia bukan negara pengklaim di Laut Cina Selatan namun Indonesia mempunyai kepentingan di wilayah tersebut. Indonesia juga mempunyai tanggung jawab yang sama dengan Jepang terkait sengketa di kawasan tersebut, untuk itu Jepang dan Indonesia melakukan kerjasama baik bidang ekonomi, politik, maupun militer.

Mizukami mengatakan, banyak kapal berbendera Jepang yang melalui jalur pelayaran di Laut Cina Selatan, karena negara-negara setempat beserta pasukan bela diri Jepang harus menjaga keamanan wilayah Laut Cina Selatan. Dia mengungkapkan kekhawatirannya akan peningkatan teknologi tempur Cina yang dapat mengganggu kestabilan kawasan Laut Cina Selatan. Sebelumnya, Oktober 2010 lalu, dua kapal latihan Jepang Kapal

---

<sup>12</sup> "PM India Akan Berkunjung ke Jepang Bahas Kerjasama Keamanan", dalam [http://vibizdaily.com/update\\_vibizdaily/index/18662/10](http://vibizdaily.com/update_vibizdaily/index/18662/10) diakses tanggal 20 November 2012.

Yamagiri dan Kapal Pengawal Sawayuki di bawah komando Laksamana Muda Shinichi Tokumaru pernah berlabuh juga di Pelabuhan Tanjung Priok. Pada saat itu, kedua kapal yang membawa 710 anggota pasukan tersebut berada di Jakarta dari 2-5 Oktober 2010 untuk memeriahkan Jak-Japan Matsuri dan melakukan latihan bersama AL Indonesia.<sup>13</sup>

Pada pertemuan juni 2011 antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Perdana Menteri Jepang Naoto Kan menghasilkan kerjasama salah satunya adalah peningkatan kerjasama militer. Peningkatan kerjasama militer tersebut ditujukan untuk mencegah peompakan bajak laut di daerah Selat Malaka dan pengamanan Laut Cina Selatan. Hal ini disampaikan oleh kedua kepala pemerintahan tersebut usai menggelar pertemuan selama hampir 30 menit di kantor Perdana Menteri Jepang di Tokyo.

Pada tanggal 28 Februari 2012, Tiga kapal latih bela diri Jepang merapat ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kapal JS Hamagiri, JS Sawayuki, dan JS Sayuki beserta 600 anggota pasukan bela diri Jepang ini datang ke Indonesia untuk mempererat persahabatan dengan

---

<sup>13</sup> "Kerjasama Indonesia Jepang", dalam <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/06/17/88644> diakses tanggal 7 November 2012.

Indonesia. Rencananya, juga akan dilakukan latihan bersama dengan Angkatan Laut Indonesia. Ketiga kapal tersebut, yang disambut oleh Wakil Kedubes Jepang untuk Indonesia Makita Shimokawa, dikomandani oleh Kolonel Laut Tomoo Mizukami.<sup>14</sup>

Di sela-sela KTT G20 di Los Cabos pada tanggal 20 Juni 2012, sebuah pertemuan bilateral antara Jepang dan Indonesia digelar. Pada pertemuan yang berlangsung selama 50 menit itu dibahas kerjasama bilateral untuk keamanan kawasan, khususnya di wilayah Laut China Selatan. Selain memberikan penegasan akan perlunya negara-negara terkait untuk menetapkan dan melaksanakan komitmen kepada peraturan yang riil seperti jaminan pelayaran yang bebas, hormat dan taat pada peraturan internasional, pemecahan konflik secara damai, kedua pemimpin sepakat untuk bekerja sama bagi perdamaian dan stabilitas Laut Cina Selatan.<sup>15</sup>

Pada Kamis 14 Februari 2012, Ketegangan di Laut China Selatan mendapat perhatian khusus dalam pertemuan bilateral antara Menlu RI Marty Natalegawa dan Menlu

---

<sup>14</sup> "Tiga kapal jepang merapat ke indonesia", dalam <http://divisi.blogspot.com/2012/02/tiga-kapal-latih-jepang-merapat-ke.html> diakses tanggal 5 November 2012.

<sup>15</sup> "Indonesia -Jepang Siap Wujudkan Stabilitas Laut China Selatan", Dalam <http://jaringnews.com/internasional/amerika/17247/indonesia-jepang-siap-wujudkan-stabilitas-laut-china-selatan> diakses tanggal 22 Februari 2013.

Jepang Fumio Kishida, di Tokyo. Dialog strategis tahun 2013 juga memiliki makna tersendiri karena menandai 55 tahun hubungan bilateral kedua negara serta 40 tahun hubungan kerjasama ASEAN dengan Jepang selaku mitra wicara. Secara khusus kedua Menlu juga membahas berbagai isu strategis yang berkembang di kawasan, antara lain perkembangan di Laut Cina Selatan dan di Semenanjung Korea. Seperti diketahui, Jepang pun kini terlibat sengketa dengan Cina. Kedua negara berebut gugusan pulau yang di Jepang disebut Senkaku dan di China disebut Dioayu. Sejauh ini konflik masih berlangsung. Dalam pertemuan ini, kedua Menlu juga membahas tindak lanjut kunjungan PM Shinzo Abe ke Jakarta pada tanggal 18 Januari 2013 yang lalu.<sup>16</sup>

#### 4. Kerjasama Jepang Filipina

Pada bulan April 2012 Ketegangan antara Filipina dan Cina di wilayah Laut Cina Selatan seperti yang terjadi di Scarborough Shoal, memang lampu kuning menuju Perang Perpanjangan tangan (Proxy War) antara Amerika Serikat dan Cina di kawasan Asia Tenggara, atau

---

<sup>16</sup> "Dialog Strategis Indonesia-Jepang Singgung Sengketa Laut China Selatan", Dalam <http://jaringnews.com/internasional/asia/34463/dialog-strategis-indonesia-jepang-singgung-sengketa-laut-china-selatan> diakses tanggal 22 Februari 2013.



pada skala yang lebih luas, di kawasan Asia Pasifik. Jepang kiranya cukup beralasan untuk berbagi kecemasan bersama Amerika Serikat dan Vietnam menyusul semakin agresifnya postur militer Cina di Asia Pasifik. Berdasar studi SIPRI (*Stockholm International Peace Research Institute*) 2010, Cina merupakan negara Asia dengan anggaran militer terbesar.<sup>17</sup>

Menteri luar negeri Filipina dan Jepang pada 1 Oktober 2012 setuju untuk meningkatkan kerjasama keamanan maritim. Menlu Jepang Fumio Kishida mengatakan ia dan Albert del Rosario menyepakati dialog kebijakan penguatan, meningkatkan kerjasama maritim dan langkah-langkah lainnya. "Ketika lingkungan strategis di wilayah ini berubah, maka perlu bagi kita sebagai Menteri Luar Negeri untuk berbagi pengakuan situasi, meningkatkan kemitraan strategis antara kedua negara, dan bekerja sama menuju serta membentuk perdamaian dan kesejahteraan di Asia Pasifik," jelas Rosario.<sup>18</sup>

Menanggapi langkah pemerintah Cina yang semakin agresif dalam mengklaim teritorialnya, Pemerintah

---

<sup>17</sup> "Cermati Tiga Kekuatan Militer Baru di Asia Pasifik: Cina, Jepang dan India", dalam [http://www.theglobal-review.com/content\\_detail.php?lang=id&id=8080&type=99#.US7je2c4lqh](http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=8080&type=99#.US7je2c4lqh) diakses tanggal 25 Februari 2013.

<sup>18</sup> "Jepang-Filipina Tingkatkan Kerjasama Maritim", dalam <http://www.wartanews.com/internasional/e55e48d2-85de-ab32-e57b-8bd7d6cacfa5/jepang-filipina-tingkatkan-kerjasama-maritim> diakses tanggal 25 Februari 2013.

Filipina dan Jepang meratifikasi perjanjian kerja sama anti-senjata kimia hingga lima tahun ke depan. Perjanjian ini juga diikuti pemberian 12 kapal patroli baru dan bantuan finansial kepada Angkatan Laut Filipina. Menteri Luar Negeri Filipina Del Rosario menyatakan, pihaknya menginginkan Jepang untuk memasang senjata dan memperbaiki kemampuan armada penjaga pantai mereka. Hal ini dimaksudkan untuk menangkal kemampuan militer China yang terus berkembang.<sup>19</sup>

#### 5. Kerjasama Jepang Australia

Sejak tahun 2007, Jepang dan Australia beserta Amerika Serikat menggelar latihan rutin setiap tahunnya, ketiga negara tersebut selalu rutin melakukan latihan militer gabungan untuk mempererat kerjasama militer antara ketiga negara tersebut. Menteri Pertahanan Jepang dan Australia sepakat untuk memperdalam hubungan pertahanan bilateral dan memperkuat kerja sama dalam operasi gabungan. "Kami ingin membuat hubungan Jepang-Australia yang lebih substantif dan menjembatannya dengan kerja sama trilateral antara Jepang, Amerika

---

<sup>19</sup> "Filipina Coba Hadang China dengan Bantuan Jepang", dalam <http://jakarta.okezone.com/read/2013/02/06/411/757760/filipina-coba-hadang-china-dengan-bantuan-jepang> diakses tanggal 25 Februari 2013.

Serikat dan Australia," kata Menteri Pertahanan Jepang Satoshi Morimoto dalam pertemuan di kementerian dengan Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith, Selasa 25 september 2012.<sup>20</sup>

Menurut kantor berita Kyodo, Smith mengatakan, dia berharap hubungan pertahanan bilateral Antara kedua negara akan melangkah lebih jauh. Mengenai sengketa teritorial terakhir atas segugusan pulau di Laut Cina Timur yang telah membuat tegang hubungan antara Jepang dan Cina, Morimoto mengatakan, masalahnya adalah bagaimana Jepang harus berurusan dengan kedatangan kapal-kapal Cina dan bagaimana pihaknya dapat mempertahankan hubungan Jepang-Cina dengan cara yang stabil. Smith, yang berbicara pada konferensi pers bersama setelah pertemuan itu, mengatakan, dia mengharapkan solusi damai atas sengketa berdasarkan hukum internasional. Merujuk berita Antaranews di Jakarta, selama pembicaraan mereka, kedua menteri juga berbicara tentang rencana penyebaran 12 pesawat Mv-22 Osprey Amerika Serikat di Stasiun Udara AS Futenma di Prefektur selatan Okinawa. Mereka juga bertukar pandangan mengenai kerja sama antara Pasukan Bela Diri

---

<sup>20</sup> "Jepang Tingkatkan Kerjasama Dengan Australia", dalam <http://www.klikheadline.com/in/berita/jepang-australia-tingkatkan-hubungan-pertahanan.html>, diakses tanggal 6 November 2012.

Jepang dan militer Australia dalam misi penjaga perdamaian PBB, serta cara-cara untuk meningkatkan kemampuan kemitraan pada saat terjadi bencana alam besar.<sup>21</sup>

### **C. Meningkatkan Kekuatan di bidang Pertahanan**

#### 1. Kebijakan Pertahan Jepang Pasca Perang Dingin-2007

Pasca Perang Dingin, khususnya pecahnya Perang Teluk 1990-1991 menjadi pemicu awal berkembangnya pemikiran di Jepang untuk meninjau ulang penugasan Pasukan Bela Diri. Ada aspirasi di sebagian elit Jepang dan didukung oleh Amerika Serikat agar Pasukan Bela Diri dapat dikerahkan ke luar negeri untuk tugas tertentu. Aspirasi ini terkait dengan kritik terhadap Jepang selama Perang Teluk 1990-1991 bahwa negeri itu menjadi penumpang gratis (*free rider*) dan menjalankan "*checkbook diplomacy*", meskipun saat itu JMSDF (*Japan Maritime Self Defense Force*) mengirimkan kapal penyapu ranjau ke Teluk Persia.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> "Transformasi Badan Pertahanan Jepang dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Keamanan Maritim Asia Pasifik", dalam <http://www.fkpmaritim.org/?p=879>, diakses pada 10 November 2012.

Aspirasi yang berkembang di Jepang kemudian ditindak lanjuti dengan penyusunan *International Peace Cooperation Law* 1992 yang mengatur secara ketat pengerahan Pasukan Bela Diri ke luar Jepang. Sejak undang-undang itu dikeluarkan hingga saat ini, Jepang telah aktif mengirimkan pasukannya ke Kamboja, Timor Timur, Irak, Samudera India dan Aceh dalam berbagai misi. Misinya antara lain adalah Operasi Perdamaian PBB, Operasi Rekonstruksi dan Operasi Kemanusiaan.<sup>23</sup>

Perubahan sistem internasional dan meningkatnya potensi ancaman Pasca Perang Dingin menyebabkan Jepang merasa perlu mengantisipasi dengan mengubah kebijakan pertahanan. Perubahan kebijakan pertahanan Jepang tertera dalam NDPO (*National Defence Program Outline*) 1996 sebagai dasar kebijakan pertahanan Jepang pasca Perang Dingin.<sup>24</sup> NDPO 1996 memasukan peran pertahanan Jepang di kawasan selepas Perang Dingin yang mengendapkan rencana kerjasama Jepang-AS untuk menghadapi ancaman seperti bila terjadi agresi militer, baik terhadap Jepang atau wilayah lain di luar Jepang yang dapat mengganggu stabilitas kawasan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan kebijakan pertahanan Jepang

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> "Amerika-Jepang", dalam <http://www.mofa.go.jp/regional/n-america/us/q&a/ref/6a.htm>, diakses pada 5 November 2012.

pada NDPO 1996 dari NDPO 1976 hanya berfokus pada kerjasama Jepang-AS dalam menghadapi serangan terhadap Jepang semata. Dalam upaya menghadapi perubahan situasi keamanan di kawasan, Jepang pun memperluas kerjasama pertahanan dengan AS pada 17 April 1996 melalui "*Jepang-US Joint Declaration on Security, Alliance For The 21<sup>st</sup> Century*".<sup>25</sup>

Pada Desember 2004 Kabinet Jepang meluluskan *National Defense Program Guidelines* (NDPG) sebagai kebijakan baru pertahanan Jepang yang mulai diterapkan pada tahun 2005. Perhatian mengenai peningkatan potensi ancaman di kawasan tercantum dalam NDPG 2005. NDPG 2005 meletakkan Teori Ancaman Militer Cina kedalam dokumen resmi kebijakank pemerintah yang belum tercantum dalam NDPO Jepang sebelumnya. Rencana pertahanan Jepang 2005-2006 untuk pertama kalinya menyebut Cina sebagai ancaman.<sup>26</sup>

Pada tahun 2006 dibentuk *Defense Posture Review Board* di dalam *Japan Defense Agency* (JDA), yang melakukan rangkaian diskusi untuk mengulas kapabilitas

---

<sup>25</sup> "Japan-US *Joint Declaration on Security* ", dalam <http://www.mofa.go.jp/region/n-america/security/security/html>, diakses tanggal 5 November 2012.

<sup>26</sup> "The US-Japan *Aliance*", dalam <http://ftp.fas.org/irp/workd/japan/jda.htm>, diakses tanggal 6 November 2012.

pertahanan Jepang. Jepang pun mempelajari dengan seksama potensi ancaman di kawasan. Pada *Defense White Paper* Jepang tahun 2001 dilaporkan adanya peningkatan pesat dari kesiapan militer Cina dalam kualitas dan kuantitas kekuatan angkatan laut dan udara. Inilah titik dimana Jepang menitik perhatian resmi terhadap upaya pengembangan militer Cina. Pada Desember 2003, PM. Junichiro Koizumi memerintahkan JDA untuk mulai merevisi NDPO 1996 dengan melihat peningkatan potensi ancaman yang ada.<sup>27</sup>

Situasi di Laut Cina Selatan membuat Jepang harus lebih meningkatkan kemandirian negaranya, ketidakstabilan di kawasan Laut Cina Selatan seperti itu menjadi faktor ketidakstabilan utama terhadap keamanan kawasan. Cina yang memiliki pengaruh kuat atas keamanan kawasan telah memodernisasi kemampuan nuklir dan rudalnya seperti pasukan laut dan udara dan memperluas wilayah operasi di laut. Jepang menyatakan sikapnya untuk tetap waspada terhadap arah perkembangan militer Cina ini dimasa depan. Perlu diperhatikan pada pernyataan dalam NDPG 2005 ini adalah bahwa Jepang menyebut dengan jelas ancaman serius yang ditimbulkan Korea Utara dan terhadap perkembangan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

militer Cina. Penyesuaian besar dalam NDPG 2005 selanjutnya adalah dalam hal penentuan tujuan dari kebijakan keamanan Jepang yang memiliki dua tujuan. Tujuan *pertama* adalah untuk mencegah ancaman apapun dari secara langsung mencapai Jepang dan jika hal itu terjadi, untuk mengusir ancaman sekaligus meminimalisir kerusakan. Tujuan *kedua* adalah untuk mengurangi kesempatan munculnya ancaman apapun di berbagai bagian dunia sebagai upaya untuk mencegah mencapai Jepang.<sup>28</sup> Tujuan pertama dari upaya yang diraih Jepang adalah melalui peningkatan kemampuan pertahanan dan peningkatan kerjasama pertahanan dengan AS. Tujuan kedua dilakukan melalui peran serta aktif Jepang sendiri dalam kerjasama dengan komunitas internasional. Tujuan pertama merupakan satu bentuk strategi kemandirian nasional, sementara tujuan kedua merupakan bentuk dari strategi keamanan internasional.

## 2. Perubahan Badan Pertahanan Jepang

Jepang melakukan perubahan kebijakan pertahanan Puncaknya saat parlemen menyetujui usulan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe untuk membentuk Departemen

---

<sup>28</sup> "Peningkatan pertahanan Jepang", dalam [http://www.mod.go.jp/epolicy/f\\_work/taikou05/fy200501.Pdf](http://www.mod.go.jp/epolicy/f_work/taikou05/fy200501.Pdf) Diakses tanggal 6 November 2012.



Pertahanan sebagai peningkatan status Badan Pertahanan Jepang atau *Japan Defence Agency* (JDA) dan diwujudkan 9 Januari 2007 menjadi Departemen pertahanan Jepang. Departemen Pertahanan Jepang adalah perubahan dari Badan Pertahanan Jepang. Sebagaimana diatur dalam Konstitusi 1947 yang isinya ditentukan oleh Amerika Serikat melarangn Jepang memiliki kekuatan militer sendiri dan hanya diperbolehkan memiliki pasukan bela diri guna mempertahankan negara dari serangan musuh.

Pasukan Jepang juga tidak boleh terlibat dalam sengketa internasional. Untuk mengurus pertahanannya, pada tahun 1954, Jepang mendirikan Badan Pertahanan Jepang yang berada di bawah Kantor Kabinet. Perdana Menteri Shinzo Abe memprioritaskan perubahan dan berupaya meningkatkan status Badan Pertahanan menjadi sebuah kementerian penuh. Pada Desember 2006, parlemen Jepang menyetujui dan tidak ada penentangan berarti Bahkan partai-partai oposisi mendukungnya.

Pada 9 Januari 2007, Badan Pertahanan Jepang secara resmi berdiri menjadi Departemen Pertahanan (Dephan) yang memiliki kekuatan lebih besar karena berhak merencanakan anggaran sendiri dan mengajukan rancangan undang-undang. Tidak seperti Badan Pertahanan, Kementerian Pertahanan juga dapat menentukan

kebijakan keamanan dan pertahanan Jepang. Peresmian kementerian baru berlangsung dalam sebuah upacara cukup meriah. Acara dihadiri perdana menteri dan menteri pertahanan yang pertama serta sejumlah perwakilan militer dari 22 negara termasuk Amerika Serikat. Peningkatan status Badan Pertahanan mencerminkan adanya keinginan Jepang untuk memainkan peran lebih besar dalam mengatasi ancaman di kawasan.<sup>29</sup>

### 3. Peningkatan militer Jepang

Kekuatan militer Jepang terus ditingkatkan dari tahun ketahun terkait isu-isu yang terjadi di kawasan Asia pasifik, salah satunya terkait sengketa antara Jepang dengan cina pada kepulauan sengkaku. Isu lain yaitu terkait sengketa Laut Cina Selatan yang membuat Cina meningkatkan anggaran militernya, Jepang mengutarakan kekhawatirannya terkait transparansi dalam anggaran pertahanan Cina. Sikap Cina yang kurang transparan dinilai akan menciptakan ancaman bagi Jepang. Anggaran militer Cina naik 11,2% setiap tahunnya, saat ini anggaran militer Negeri Panda itu mencapai USD106 miliar atau sekira Rp985 triliun.

---

<sup>29</sup> "Jepang Resmi meningkatkan Badan Pertahanannya Menjadi Departemen Penuh", dalam <http://www.voanews.com/indonesia.cfm>, diakses 20 November 2012.

Tabel 3.1  
Perbandingan peningkatan Alutsista Jepang-Cina  
2009 -2012

Armed forces	jepang		Cina	
	2009	2012	2009	2012
Submarines	16	18	9	63
Destroyers	41	44	25	27
Fighters	310	742	1.320	18.700
Battle tanks	875	920	7950	9840
Active personnel	237000	239430	2,255,000	2.285.000

Sumber: "Military Strenght", dalam  
[http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country\\_id=China](http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=China) diakses pada 28 Oktober 2012.

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa kekuatan pertahanan Jepang mengalami kenaikan, Jepang mempunyai sub marines dan juga Destroyers dengan jumlah lebih banyak dari Cina. Ini menunjukkan keseriusan Jepang dalam usaha meningkatkan sistem pertahananya, hal ini dikarenakan peningkatan militer Cina yang begitu pesat terkait memanasnya kembali Laut Cina Selatan. Sejak memanasnya kembali Laut Cina Selatan, Cina mulai terlihat mengalami kenaikan anggaran militer yang begitu pesat.

Gambar 3.1  
Armada Angkatan Laut Jepang



Sumber: "Armada Angkatan Laut Jepang", dalam <http://jakarta.okezone.com/read/2012/06/06/468/642528/al-china-as-australia-gelar-latihan-militer>, diakses tanggal 29 Oktober 2012.

Pada gambar diatas adalah salah satu contoh kapal milik Armada Angkatan Laut Jepang, kapal tersebut sering digunakan untuk latihan gabungan atau latihan militer bersama antar Jepang dengan negara-negara sekutunya.

pada Desember 2010 lalu, Jepang telah mengumumkan haluan Pertahanan Baru sebagai respons atas meningkatnya anggaran militer Cina dan sepek terjangnya di kawasan Asia Pasifik. Berarti, ada satu tren

terjadinya militerisasi baik di pihak Jepang yang notabene masih terikat pada perjanjian persekutuan keamanan bersama antara Jepang dan Amerika Serikat. Sebagai konsekwensi dari haluan baru pertahanan Jepang untuk mengimbangi kekuatan militer Cina, Jepang memutuskan untuk menjalin kerjasama strategis dengan Amerika Serikat untuk menjamin keamanan nasional Jepang. Dan konsekwensinya, Jepang akan mempersilahkan kehadiran militer Amerika di Jepang.<sup>30</sup>

Pada tanggal 2 April 2012, Cina mengumumkan kenaikan dua digit anggaran belanja militer tahun 2012, tindakan yang menimbulkan kecemasan atas pembangunan militer Cina dan meningkatkan ketegangan kawasan. Anggaran belanja militer akan meningkat 11,2 persen menjadi 670,27 miliar yuan (10,41 miliar dolar AS), kata Li Zhaoxing, juru bicara parlemen nasional Cina, mengutip satu laporan anggaran belanja yang diajukan ke parlemen negara itu. Angka itu menurun dari tahun 2011 ketika anggaran naik 12.7 persen tetapi mungkin masih menimbulkan kekhawatiran menyangkut tindakan agresif Cina yang meningkat di kawasan Asia Pasifik dan mendorong Jepang menjalin hubungan lebih erat dengan Amerika Serikat. Pembangunan militer yang cepat

---

<sup>30</sup> Mainichi Daily News, 2011

menimbulkan kewaspadaan Jepang dan juga Amerika Serikat, yang pada 2012 mengumumkan satu strategi pertahanan yang dipusatkan mengimbangi kekuatan militer Cina yang meningkat.<sup>31</sup>

Jepang berulang-ulang mempersoalkan niat-niat militer Cina. Satu laporan yang didukung pemerintah Jepang memperingatkan bahwa tindakan agresif Cina di Laut Cina Selatan dapat segera terjadi di perairan-perairan tetangga. Cina dan Jepang juga memiliki sengketa lama menyangkut gugusan pulau yang tidak berpenduduk tetapi strategis yang dikenal sebagai Senkaku di Jepang dan Diaoyu di Cina, yang teletak antara Jepang dan Taiwan di Laut Cina Timur. Kedua negara ada kalanya terlibat bentrokan diplomatik menyangkut masalah itu, yang muncul pada akhir tahun 2010, ketika Jepang menahan kapten satu kapal nelayan Cina dekat gugusan pulau itu setelah menabrak kapal penjaga pantainya.<sup>32</sup>

Anggaran pertahanan Jepang dalam tahun anggaran 2013 telah ditingkatkan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe. Pria yang kini untuk kedua kalinya menduduki

---

<sup>31</sup> "China Umumkan Peningkatan Anggaran Pertahanan", dalam [http://www.analisadaily.com/news/read/2012/03/05/38879/china\\_umumkan\\_peningkatan\\_anggaran\\_pertahanan/#.US8CzGc4lqg](http://www.analisadaily.com/news/read/2012/03/05/38879/china_umumkan_peningkatan_anggaran_pertahanan/#.US8CzGc4lqg) diakses tanggal 25 Februari 2012.

<sup>32</sup> *Ibid.*

jabatan Perdana Menteri Jepang menaikkan anggaran pertahanan Jepang dari US\$ 436 juta menjadi US\$ 51.8 milyar. Menurut catatan, peningkatan tersebut merupakan yang pertama kalinya sejak 2011. Peningkatan anggaran pertahanan itu sebenarnya tak mengejutkan. Sebab Jepang kini menghadapi ancaman Cina, khususnya terkait dengan sengketa atas Kepulauan Senkaku. Sebagian dari dana hasil peningkatan anggaran pertahanan itu akan digunakan untuk pemeliharaan dan pemeliharaan data pesawat Boeing 767 AWAC Jepang, juga pesawat E-2C AEW&C.<sup>33</sup>

Kedua Jepang pesawat itu memiliki fokus patroli pada Laut Cina Timur yang merupakan ladang sengketa Tokyo dan Beijing. Di samping itu, peningkatan anggaran juga ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pengamatan dan pengintaian Jepang di sekitar Kepulauan Okinawa. Sebagaimana diketahui, Kepulauan Okinawa merupakan wilayah Jepang yang langsung berhadapan dengan Cina, di mana kapal perang dan pesawat tempur Cina sering digelar di sekitar kepulauan itu. Kapal perang Cina yang hendak menuju ke Samudera Pasifik pula harus

---

<sup>33</sup> "Jepang Tambah Anggaran Militer", dalam <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/01/08/mg-az3s-jepang-tambah-anggaran-militer> diakses tanggal 25 Februari 2013.

melewati Kepulauan Okinawa. Kebijakan Perdana Menteri Jepang saat ini untuk meningkatkan anggaran pertahanan Jepang nyaris tanpa reaksi keras dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Hal itu dapat dipahami karena negara-negara di kawasan ini juga merasa mulai terancam dengan asertivitas Cina. Satu-satunya negara yang memprotes kebijakan Abe adalah Cina.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*



**BAB IV**

**KEBIJAKAN JEPANG DALAM MENGAMANKAN KEPENTINGAN**

**EKONOMI TERKAIT KONFLIK LAUT CINA SELATAN**

Sebagai negara yang mendasarkan kehidupan utamanya dari perdagangan, kepentingan ekonomi Jepang biasanya ikut menentukan arah kebijakan politik luar negerinya. Hasil survey di Jepang menunjukkan bahwa keuntungan yang dapat diraup oleh perusahaan-perusahaan swasta Jepang dari perdagangan dan investasinya di negara-negara ASEAN dan NIE's (*Newly Industrialised Economies*) seperti Hong Kong, Singapura dan Korea Selatan pada permulaan abad ke 21 ternyata jauh lebih besar ketimbang perdagangannya dengan AS. Apalagi dengan Cina yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dan yang mulai berkembang ke arah liberalisasi perdagangan, merupakan potensi pasar yang sangat cerah dan menjanjikan bagi hari depan perdagangan Internasional Jepang serta tempat investasi yang sangat menguntungkan.

Dalam bab ini akan membahas tentang apa saja kepentingan ekonomi Jepang di Laut Cina Selatan. Selain itu akan mengulas juga tentang bagaimana kebijakan

Jepang dalam mengamankan kepentingan ekonominya di Laut Cina Selatan.

#### **A. Pengamanan Jalur Ekspor-Import Jepang**

Posisi Asia Tenggara terbentang di dua persimpangan jalur laut terbesar di dunia. Yang pertama adalah Jalur Utara Selatan yang menghubungkan antara kawasan Asia Timur dengan Australia, yang kedua adalah jalur Timur-Barat yang menghubungkan antara Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Letak Asia Tenggara yang sangat strategis berdasarkan jalur ini, tentu saja menempatkan Asia Tenggara sebagai kawasan yang sangat penting baik Ekonomi maupun keamanan. Oleh karena itu Jepang memiliki Kepentingan -kepentingan untuk bebas akses dan terbuka di jalur Asia Tenggara atas kepentingan ekonomi dan Laut Cina Selatan merupakan jalur akses laut yang masuk dalam kawasan atau wilayah Asia Tenggara dan menjadikannya penting untuk dijaga kebebasan berlayarnya.

Adanya masalah di Laut Cina Selatan mengakibatkan jalur perdagangan tersebut menjadi tidak aman. Implikasinya adalah terganggunya Jepang sebagai salah satu pengguna jalur pelayaran tersebut untuk aktivitas ekspor-impornya. Dengan demikian ekonomi Jepang akan

terganggu. Ketika ekonominya melemah maka hal ini akan menurunkan bargaining posisinya dalam aliansi militer yang tergabung dalam blok barat sehingga aliansi tersebut juga ikut melemah. Karena pada dasarnya kekuatan ekonomi Jepang adalah alat untuk *bargaining positionnya* dan penopang aliansi tersebut. Jelas ini merupakan suatu tantangan bagi Jepang.<sup>1</sup>

#### 1. Jalur Ekspor Jepang

Selain Impor Jepang yang cukup banyak, Jepang juga memasarkan baran-barang hasil industrinya yidak hanya di dalam negeri saja, itu artinya bahwa Jepang memasarkan hasil industrinya keluar negeri atau yang biasa kita sebut Ekspor. Tidak hanya aktifitas Impor saja yang melalui jalur Laut Cina Sealatan namu aktifitas ekspor jepang sebagian besar juga melalui jalur Laut Cina Selatan.

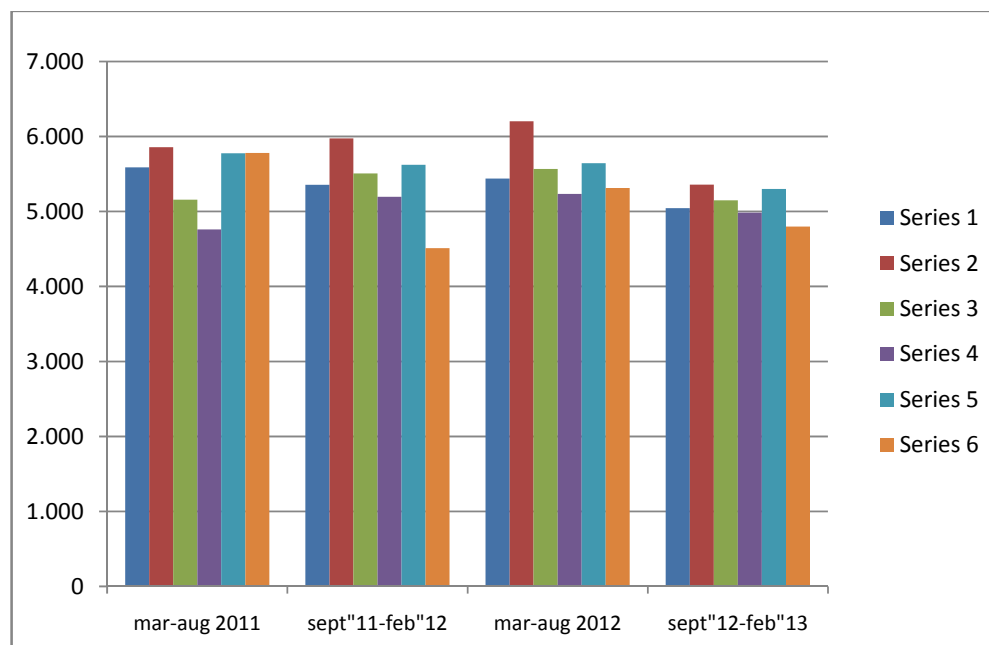
Para pengusaha Jepang saat ini sedang saling bersaing untuk melakukan perdagangan dan investasi di Cina, yang jumlahnya lebih besar daripada dengan Amerika Serikat. Ekspor Jepang ke negara-negara Asia selama tahun 2003 mencapai jumlah US \$ 211,7 milyar,

---

<sup>1</sup> "Sengketa Teritorial Laut China Selatan," Dalam <http://djangka.org/2012/04/30/sengketa-teritorial-laut-china-selatan/> Diakses pada 18 September 2012.

sedangkan ekspor ke Amerika Serikat hanya sebesar US \$115,6 milyar, dan ke Eropa sebesar US \$ 67,1 milyar. Atas dasar kenyataan ini sebenarnya diharapkan Jepang lebih berorientasi ke Timur daripada berorientasi ke Barat, antara lain dengan lebih banyak melibatkan diri pada perdagangan dan investasi ke Asia. Namun masih sangat prematur pada saat ini untuk dapat menyimpulkan bahwa Jepang pada suatu saat bersedia bergabung dalam "Asia Trade Bloc".<sup>2</sup>

Grafik 4.1  
Jumlah Ekspor Jepang 2011-2013



Sumber : "Japan Export", dalam <http://www.tradingeconomics.com/japan/exports> Diakses tanggal 23 Februari 2013.

<sup>2</sup> Abdul Irsan, *Politik Domestik, Global dan Regional*, Hasanudin University Press, Makassar, 2005, hal. 99-100.

Mulai Sejak september 2012 hingga Januari 2013, jumlah Ekspor Jepang menurun dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Ekspor Jepang turun menjadi 4.799,16 Miliar JPY pada bulan Januari 2013 dari 5.299,22 Miliar JPY pada bulan Desember 2012. Selain karena terkait isu sengketa di Laut Cina Selatan, hal ini juga terkait dengan memanasnya hubungan antara Cina dengan Jepang terkait isu sengketa pulau. Ekspor produk teknologi tinggi telah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Jepang sejak tahun 1960. Ekspor utama Jepang antara lain kendaraan bermotor 21% dari total ekspor, non-listrik mesin, peralatan dan aparat mekanik 21%, elektronik konsumen dan semikonduktor 18%, bahan kimia 12%, besi dan produk baja 6% dan ilmiah dan peralatan optik 3%. Mitra ekspor utama antara lain China 30% dari total ekspor, Amerika Serikat 15%, Korea Selatan 7,5%, Thailand 4,5% dan Jerman 3%, Lainnya termasuk Inggris, Belanda, Australia dan Singapura. Halaman ini mencakup grafik dengan data historis untuk Ekspor Jepang.

Selain menjadi negara yang mempunyai Ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat, Jepang juga menjadi perekonomian terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Cina dalam hal keseimbangan kemampuan berbelanja. Industri utama Jepang adalah

sektor perbankan, asuransi, real estate, transportasi, telekomunikasi dan konstruksi. Jepang memiliki industri berteknologi tinggi di bidang otomotif, elektronika, perkakas mesin, baja, logam, nonbesi, industri kapal, industri kimia, tekstil, dan pengolahan makanan. Sebesar tiga perempat dari produk domestik bruto Jepang berasal dari sektor Jasa.

Ekonomi Jepang saat ini mengalami peningkatan pasca perang dengan didukung oleh ekspor Jepang dan Investasi korporasinya. Perusahaan-perusahaan Jepang dapat dikatakan sebagai penggerak utama ekonomi utama dalam negeri dibantu yen yang melemah dan ekspor yang sangat cerah, perusahaan dapat meraih untung yang tinggi dari tahun ke tahun. Perekonomian Jepang saat ini pun telah menjangkau ke seluruh pelosok dunia dan perdagangan internasionalnya merupakan bagian dari upaya pemenuhan kepentingan nasionalnya. Keamanan perekonomian Jepang sangat dipengaruhi oleh keamanan perdagangan Internasionalnya, sehingga Jepang sangat memperhatikan keamanan regional dan global. Jepang juga memiliki pengaruh dalam upaya mewujudkan keamanan regional dan global, oleh karena itu sikap politik Jepang akan selalu diperhitungkan oleh negara-negara

besar dunia dan merupakan salah satu kekuatan penyeimbang bagi stabilitas keamanan kawasan.

## 2. Jalur Impor Jepang

Sebagai negara Industri yang sangat maju, Jepang membutuhkan pasokan kebutuhan untuk menunjang kebutuhan industrinya. Tanpa impor dengan jumlah besar Jepang tidak mungkin dapat memelihara statusnya sebagai negara industri maju dan kekuatan ekonomi kedua dunia.

Tabel 4.1  
Negara sumber Impor Jepang  
(2006)

<b>Negara</b>	<b>Jumlah Impor (persentase)</b>
Uni Eropa	10,3
Arab Saudi	6,4
Uni emirat Arab	5,5
Australia	4,8
Thailand	4,7
Indonesia	4,2

Sumber: "Negara Sumber Impor Jepang", dalam <http://atanitokyo.com>, diakses tanggal 4 November 2012.

Impor utama Jepang adalah energi minyak, bahan mentah industri dan produk-produk pertanian dan perikanan. Jepang adalah negara pengimpor hasil laut terbesar di dunia (senilai US \$ 14 milyar). Jepang

berada di peringkat keenam dengan total tagkapan ikan yang terus menurun sejak tahun 1996.<sup>3</sup>

Dalam menatap kecenderungan ke hari depan, Jepang selalu aktif mengaitkan kemampuan teknologi dan industrinya dengan perkembangan ekonomi global yang akan dihadapinya. Kenaikan harga minyak bumi merupakan perhatian utama Jepang mengingat keperluan Jepang dari sumber energi tersebut sangat tinggi. Jepang sedang berusaha mengembangkan teknolongi baru untuk mendapatkan supaly minyak dan gas bumi bagi keperluan industrinya, dengan membangun pipa di bawah laut yang langsung menghubungkan Jepang dengan negara yang mensuplay minyak dan gas bumi dan mengembangkan bio-energi.

#### a. Impor Minyak Jepang dari Timur Tengah

Dengan kebutuhan energi yang besar untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, Jepang selalu menginginkan terjaminnya kelancaran sumber energi tersebut. Laut Cina Selatan merupakan jalur terpenting bagi Jepang untuk mengangkut suplay minyak dari timur tengah. Besarnya impor minyak dapat dilihat dari tabel berikut.

---

<sup>3</sup> "Negara Sumber Impor jepang", dalam <http://atanitokyo.com>. Diakses tanggal 4 November 2012.



Tabel 4.2  
 Impor Minyak Jepang  
 (2003-2010)

Tahun	(%)dari penggunaan energi impor bersih
2003	83,39
2004	81,8
2005	80,69
2006	80,49
2007	82,41
2008	82,1
2009	80,13
2010	80,79

Sumber: "Energy imports; net (% of energy use) in Japan", dalam <http://www.tradingeconomics.com/japan/energy-imports-net-percent-of-energy-use-wb-data.html> diakses tanggal 23 Februari 2012.

Impor Energi bersih (% dari penggunaan energi) di Jepang terakhir kali dilaporkan pada 80,79 pada tahun 2010, menurut laporan Bank Dunia yang diterbitkan pada tahun 2012. Jepang mengimpor minyak sejak lama karena memang Jepang tidak dapat memproduksi energi minyak sendiri. Pada tahun 2009 impor minyak Jepang mengalami penurunan seiring dengan maraknya pembajakan di selat malaka dan memanasnya sengketa teritorial di Kawasan Laut Cina Selatan yang merupakan Jalur utama

yang dilewati kapal-kapal Jepang untuk mengangkut minyak yang di Impor dari Timur Tengah. Hal Ini Tentunya sangat mengganggu perekonomian Jepang.

b. Impor Batu bara Dan Gas Alam Cair Jepang

Pasar konsumen batu bara terbesar adalah kawasan Asia, yang mengkonsumsi sekitar 54 persen dari konsumsi batu bara dunia. Seiring dengan kemajuannya di bidang industri, Jepang kini merupakan negara pengimpor batu bara terbesar di dunia dengan volume impor 182 juta ton pada tahun 2007, diikuti korea 88 juta ton dan Cina Taipe 69 juta ton.<sup>4</sup>

Jepang sangat mengandalkan impor batu bara dari Indonesia, menurut data pada tahun 2008, impor batu bara Jepang dari Indonesia sekitar 30% (persen) dari kebutuhan negeri sakura ini. Peningkatan berarti kontribusi dari Indonesia meningkat sejak tahun 2003 yaitu sekitar 22% (persen). Pada tahun 2006 batu bara memberikan pemasok energi primer kedua setelah minyak di Jepang. Disamping sebagai pembangkit listrik, batu bara juga digunakan pada industri baja.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> "Kebutuhan Batu Bara Jepang", dalam <http://cetak.kompas.com>, Diakses tanggal 4 November 2012.

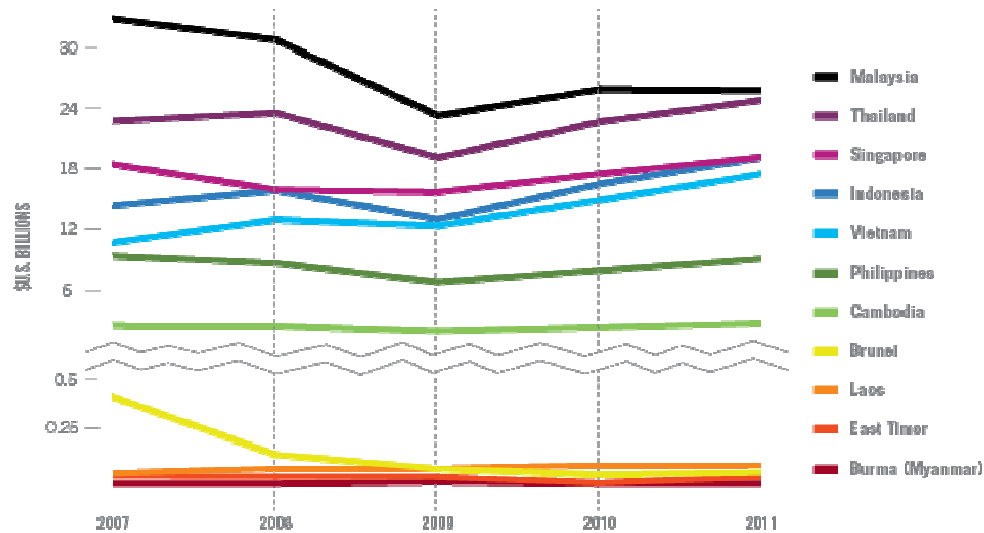
<sup>5</sup> *Ibid.*

Sedangkan untuk impor gas alam cair, menurut data dari Badan Energi Internasional (*International Energy Agency* (IEA)), pada tahun 2007 Jepang menempati posisi kedua importir Gas alam cair terbesar didunia dengan volume 95.627 juta meter kubik per tahun atau sekitar 45 juta ton. Indonesia merupakan pemasok gas alam cair terbesar untuk Jepang dan menguasai 2/3 pasokan Gas alam cair Jepang dari kawasan Asia Tenggara. Kontrak gas alam cair Indonesia-Jepang sebanyak 8,4 juta ton per tahun berakhir pada tahun 2010, sementara kontrak 3,6 juta ton per tahun berakhir pada 2011.

#### c. Impor Produk Pertanian dan Perikanan

Jepang merupakan negara yang miskin akan sumber daya alam, maka dari itu Jepang mengimpor produ-produk pertanian dan perikanan. Impor produk-produk tersebut sebagian berasal dari kawasan Asia Tenggara, sehingga Laut Cina Selatan menjadi jalur utama Jepang untuk mengangkut barang barang impornya sebagai bahan baku industri maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Grafik 4.2  
Negara Sumber Impor Jepang  
2007-2011



Sumber : "Southeast Asia:Region on", dalam [http://www.inboundlogistics.com/cms/userfiles/southeast\\_asia\\_graph\\_inline\\_0113.png](http://www.inboundlogistics.com/cms/userfiles/southeast_asia_graph_inline_0113.png) diakses tanggal 26 Februari 2013.

Dari Grafik tersebut dapat dilihat bahwa hampir semua negara di Asia Tenggara adalah negara sumber Ekspor Jepang, pada tahun 2009 impor Jepang rata-rata mengalami penurunan terkait memanasnya konflik laut Cina Selatan. Pada tahun 2009 Laut Cina Selatan memanas ketika Tiongkok menerbitkan peta Baru yang mencakup seluruh wilayah Laut Cina Selatan. Produk-produk yang di impor Jepang antara lain.

Tabel 4.3  
 Impor Produk Pertanian dan Perikanan Jepang  
 Dari Asia Tenggara 2003-2005

Jenis Produk	2003	2004	2005
Daging	1000	985	1.705
Produk Susu	91	100	111
Ikan	1.475	1.539	1.562
Udang	248	238	235
Gandum	126	138	136
Maize	197	225	203
Buah-buahan	351	366	383
Sayur-sayuran	361	380	396
Gula	34	32	31
Kopi dan Coklat	110	110	146
Kacang Kedelai	176	192	157
Natural Rubber	91	112	130
<b>Total</b>	<b>4.260</b>	<b>4.417</b>	<b>4.565</b>

Sumber: Japan Exports and Imports (2003-2005)", dalam [http://www.economywatch.com/world\\_economy/asia-pecific/export-import.html](http://www.economywatch.com/world_economy/asia-pecific/export-import.html) diakses tanggal 11 November 2012.\

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa impor Jepang dari tahun ke tahun rata-rata mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan Jepang yang tidak bisa tercukupi sendiri semakin meningkat dan Jepang menginginkan kelancaran pasokan impor tersebut lancar agar kebutuhannya dapat terjamin.

## **B. Kerjasama Ekonomi untuk Mengamankan Kepentingan Jepang dan Menekan Cina di Asia Tenggara**

Sejak lama Jepang sudah khawatir dengan kemajuan ekonomi Cina, kemajuan ekonomi Cina secara tidak langsung membuat Cina berambisi untuk menguasai kawasan perairan Asia Tenggara, terutama kawasan Laut Cina Selatan. Akan tetapi perkiraan bahwa Cina akan merealisasikan ambisinya itu dengan melakukan suatu invasi militer ke Asia Tenggara adalah suatu pandangan yang tidak realistis. Cina menyadari bahwa sebuah invasi militer ke Asia Tenggara terlalu mengandung kendala dan konsekuensi, hal itu dianggap dapat merugikan kepentingan Cina di Asia Tenggara, khususnya di Selat Malaka.

Masalah yang lebih dikhawatirkan oleh Jepang adalah semakin kuatnya pengaruh Cina di Asia Tenggara, khususnya terkait klaim Cina atas Laut Cina Selatan. Karena kemajuan ekonomi Cina yang didukung oleh perkembangan industrinya menunjukkan bahwa Cina semakin membutuhkan kelancaran jalur pasokan energi minyaknya yang sangat besar. Cina telah maju dalam berbagai bidang, khususnya bidang Ekonomi. Penduduk Cina tidak kurang dari 1.200 juta jiwa menyediakan tenaga kerja yang jauh lebih murah dari negara manapun di seluruh

dunia. Diperkuat oleh faktor budayanya yang bermutu tinggi dan berusia ribuan tahun, maka Cina cepat memperoleh kemajuan ilmu dan teknologi modern yang dapat menjadikan bangsanya memiliki daya saing yang tinggi.

Dalam bidang Ekonomi di Asia, khususnya dengan negara-negara yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan Jepang memerlukan pengamanan maupun peningkatan koordinasi, mengingat pertumbuhan ekonomi Cina juga mengarah kepada negara-negara yang merupakan pangsa pasar Jepang. Beberapa kerjasama Jepang di Asia Tenggara Antara Lain:

- a. ASEAN-Japan Forum yang merupakan pertemuan tingkat Pejabat Tinggi
- b. *Post Ministerial Conference (PMC)*
- c. *ASEAN Economic Ministers-Ministry of International Trade and Industry (MITI)*
- d. KTT ASEAN-Jepang
- e. Pertemuan-pertemuan antar swasta.

Munculnya Cina sebagai kekuatan Global baru menjadi perhatian serius Jepang di Asia pasifik dan

Eropa<sup>6</sup>. Beberapa analisa melihat pemimpin - pemimpin Cina berusaha sedemikian rupa berusaha menggunakan pengaruh ekonomi dan politik mereka untuk memarginalisasi dan menghalangi peran Jepang di Asia atau dalam jangka menengah dan panjang untuk menggantikan posisi Jepang dikawasan ini. Marginalisasi peran Jepang ini memiliki tujuan jangka lebih jauh supaya Cina dapat memainkan peran lebih lanjut di level global.<sup>7</sup>

#### 1. Memperkuat Industri Jepang Di Asia Tenggara

Jumlah penduduk Asia Tenggara yang signifikan merupakan salah satu faktor yang mendukung kawasan ini potensial untuk pemasaran produk-produk Industri Jepang. Tingkat pertumbuhan perekonomian Asia Tenggara secara umum masih rendah, sehingga kemampuan dalam membangun industri tergolong lemah. Hal ini sangat menguntungkan negara Industri seperti Jepang untuk pasar Asia Tenggara. Dimulainya pasar bebas juga memberikan kemudahan bagi Jepang dalam hal ini.

---

<sup>6</sup> Quadrennial Defense Reviews, "China has the greatest Potential to Complete military with the Japan", CRS Report for Congress, 22 Januari 2007.

<sup>7</sup> "Australia and asia pasific community", dalam <http://www.oseafas.wordpress.com> diakses pada 11 November 2012.



Berikut ini adalah contoh Industri Jepang yang sudah tersebar di berbagai kawasan termasuk di Asia Tenggara.

a. Industri Transportasi dan Mesin

Perusahaan global kendaraan bermotor Jepang antara lain Toyota, Lexus, Hino, Daihatsu, Honda, Acura, Nissan, Infiniti, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Subaru, Isuzu, dan Denso merupakan perusahaan terbesar di dunia produsen komponen otomotif. Selain Honda, Suzuki, Yamaha dan Kawasaki adalah perusahaan sepeda motor global. Industri kendaraan bermotor adalah salah satu industri yang paling sukses di Jepang, dengan saham dunia besar pada mobil, mesin-mesin listrik, bagian onderdil, Ban dan manufaktur mesin.

Jepang adalah rumah bagi enam dari 10 produsen kendaraan atas terbesar di dunia. Sebagai contoh adalah rumah bagi perusahaan-perusahaan multinasional seperti Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, dan Mazda. Beberapa perusahaan beralih ke berbagai sektor seperti elektronik untuk memproduksi peralatan elektronik karena beberapa dari mereka menjadi bagian dari keiretsu. Mobil Jepang umumnya dikenal, daya tahan mereka efisiensi kualitas, bahan bakar dan lebih banyak fitur dengan harga yang relatif lebih murah daripada

pesaing mereka. Pada tahun 1991, Jepang memproduksi 9,7 juta mobil, sehingga menjadi produsen terbesar di dunia, Amerika Serikat pada tahun yang sama menghasilkan 5,4 juta, Hanya di bawah 46% dari output ekspor Jepang. Mobil dan kendaraan bermotor lainnya, lalu bagian otomotif kelas terbesar ekspor Jepang sepanjang tahun 1980. Pada tahun 1991 mereka menyumbang 17,8% dari seluruh ekspor Jepang, meroket dari hanya 1,9% pada tahun 1960 dengan menjadi salah satu eksportir terbesar. Dan sampai tahun 2012 ini Perusahaan Jepang masih memegang peringkat utama baik di Asia Tenggara maupun di Dunia. Bahkan tersebar perusahaan-perusahaan Jepang tersebut banyak membuka lapangan kerja bagi warga di negara-negara tempat Industri tersebut tersebar.

#### b. Industri Elektronik

Banyak perusahaan besar di dunia elektronik berbasis di Jepang, diantaranya Canon, Citizen, Fujitsu, Hitachi, Keyence, Mitsubishi, Electric, NEC, Nikon, Nintendo, Panasonic, Sharp, Sega, Seiko, Sony, Toshiba, Yamaha. Jepang memiliki 7 dari produsen terbesar dunia top 20 chip pada 2005. Produk elektronik Jepang dikenal, berdaya tahan tinggi dan berkualitas, dan kecanggihan teknologi. Beberapa perusahaan

menyeberang ke sektor mobil dan keuangan sebagai bagian dari keiretsu. Industri komputer Jepang dikembangkan dengan kecepatan yang luar biasa dan pindah ke pasar internasional. Teknologi komputer Jepang beberapa yang paling maju di dunia. Komputer kerangka utama produsen terkemuka di Jepang pada akhir 1980-an (di pasar domestik) adalah Fujitsu Hitachi NECIBM Jepang Unisys.

Produsen komputer Terkemuka adalah NEC, Fujitsu, Seiko, Epson, Toshiba, IBM Jepang. Pada tahun 1988, Jepang mengekspor US \$ 1,5 miliar peralatan komputer, naik lebih dari dua belas dari US \$ 122 juta pada tahun 1980. Perusahaan-perusahaan Jepang tidak terlalu berhasil dalam mengekspor komputer mainframe, tapi mereka sangat baik dalam peralatan peripheral, seperti printer dan tape drive. Di pasar komputer yang berkembang pesat, Jepang mencapai pangsa pasar utama di Amerika Serikat selama tahun 1980. Impor peralatan komputer pada tahun 1988 datang ke US \$ 3,2 miliar (termasuk bagian).Perkembangan ekonomi, yaitu outsourcing dan globalisasi membuat perselisihan ini usang pada 1990-an. Jepang dan pengaruh AS di pasar komputer menyusut, dengan perusahaan Cina Taiwan dan daratan mengambil alih produksi komponen dan kemudian penelitian dan pengembangan.

### c. Industri Bahan makanan Dan Minuman

Nilai produksi industri makanan peringkat ketiga di antara industri manufaktur setelah listrik dan mesin transportasi. Jepang memproduksi berbagai macam produk, mulai dari item tradisional Jepang, seperti pasta kedelai (miso) dan kecap. Industri sebagai pertumbuhan secara keseluruhan mengalami kenaikan di tahun 1980, terutama dari pengembangan produk baru seperti "bir kering" dan makanan dimasak, yang semakin banyak digunakan karena kecenderungan anggota keluarga untuk makan sendiri, kecenderungan keluarga yang lebih kecil, dan kenyamanan.

Produk terkemuka dari Jepang yang tersebar di Asia Tenggara dan dunia antara lain seperti: Ajinex, Ajinomoto, Fuji, Lotte, Yakult. Sebuah fitur umum dari semua sektor industri makanan internasionalisasi mereka. Sebagai bahan baku dalam negeri kehilangan daya saing harga mereka setelah liberalisasi impor, pembuat makanan lebih sering diproduksi bahan makanan luar negeri, dipromosikan tie-up dengan perusahaan-perusahaan luar negeri, dan membeli perusahaan di luar negeri. Pada tahun 2004, industri makanan Jepang senilai US \$ 600 miliar sementara pengolahan makanan

itu bernilai US \$ 209 miliar. Hal ini sebanding dengan industri makanan Amerika Serikat dan Uni Eropa.

## 2. Memperkuat Investasi Jepang di Asia Tenggara

Jepang memiliki perusahaan - perusahaan terbesar yang berinvestasi di Asia Tenggara, sebagian besar kekayaan Jepang bergantung pada perusahaan - perusahaan multinasional yang juga memiliki kepentingan signifikan di Asia Tenggara. Asia Tenggara juga merupakan tempat utama investasi luar negeri Jepang. Kerja sama ekonomi dengan Jepang terus mengalami peningkatan meskipun dalam perkembangannya investasi asing di kawasan ini secara umum agak tertinggal dibanding dengan kawasan Asia Timur. Salah satu sektor investasi penting di Asia Tenggara adalah sumber daya alam. Negara-negara ASEAN secara kolektif merupakan kawasan dengan sumber energi dan kekayaan alam dunia yang besar seperti timah, tembaga, emas, dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti karet, kopi, serta kayu-kayuan. Hasil bumi seperti minyak dan gas juga terhitung dalam jumlah yang tidak sedikit.

Dalam perkembangannya, sejak tahun 2010 investasi Jepang di Kawasan Asia Tenggara semakin meningkat, hal ini dikarenakan Cina dinilai sudah tidak layak lagi

bagi aktivitas bisnis perusahaan multinasional asal Jepang. Selain ketegangan diplomasi bilateral, iklim bisnis di China saat ini dinilai tidak mendukung lagi bagi para pebisnis Jepang. Karenanya, sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara dianggap memiliki potensi kuat menjadi tempat limpahan bisnis Jepang dari China.

Perusahaan multinasional Jepang sekarang ini patut mewaspadaai dampak dari sengketa teritorial baik antara Jepang dengan Cina maupun antara Cina dengan negara-negara Asia Tenggara yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan terhadap bisnis mereka. Seperti diketahui, sengketa wilayah gugusan pulau di Laut Cina Selatan saat ini memicu kemarahan warga di Negeri Tirai Bambu. Demonstrasi anti-Jepang marak terjadi di seluruh penjuru China, sejak 2011. Pada saat bersamaan, muncul propaganda untuk memboikot produk made in Japan sebagai respons ketegangan kedua negara.<sup>8</sup>

Hal ini membuat perusahhan asal Jepang lebih memilih untuk beralih investasi ke Kawasan Asia Tenggara. Para produsen komponen Jepang berencana banting setir dan mengembangkan usahanya di negara berkembang seperti kawasan Asia Tenggara di Thailand,

---

<sup>8</sup> "Jepang Bidik Investasi sia Tenggara", Dalam <http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/101676> Diakses tanggal 23 februari 2013.

Vietnam, Myanmar, Indonesia dan Kamboja. Situasi ini jadi pertanda bakal terjadi penurunan aliran investasi ke China tahun depan, melukai perdagangan bilateral (Jepang-Cina) yang melonjak tiga kali lipat mencapai 340 miliar dollar AS (Rp 3.276 triliun) dalam 10 tahun terakhir. Dengan demikian, Jepang mendorong kebangkitan pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Tenggara yang merupakan pangsa pasar terbesar ketiga di Dunia. Selain karena ada ketidakharmonisan dengan Cina, perusahaan Jepang yang berinvestasi di kawasan Asia Tenggara karena tersedianya sumber dana yang murah. Indonesia, Thailand, Malaysia di indentifikasi oleh bank HSBC menjadi negara yang diuntungkan oleh kebijakan moneter longgar dari Pemerintah Jepang.<sup>9</sup>

### **C. Bantuan Jepang di Asia Tenggara**

Sejak kemajuan Cina maka Jepang harus melindungi kepentingannya di Laut Cina Selatan. Dalam mengatasi adanya kemungkinan ancaman dari Cina, maka Jepang mengambil berbagai tindakan yang dapat membuat pengaruh Jepang di Laut Cina Selatan lebih kuat. Tentu saja hal

---

<sup>9</sup> "Jepang Bekukan Investasi Otomotif di China", Dalam <http://otomotif.kompas.com/read/2012/11/14/5340/Jepang.Bekukan.Investasi.Otomotif.di.China> Diakses tanggal 23 Februari 2013.

ini membuat Jepang memiliki kewajiban untuk melakukan lebih banyak lagi hal yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Asia Tenggara, khususnya bagi negara-negara Asia Tenggara yang bersengketa di kawasan Laut Cina Selatan.

Bantuan luar negeri merupakan instrumen yang digunakan Jepang dalam bidang ekonomi dan keamanan terhadap negara-negara yang dianggap menjadi kepentingan nasionalnya, hal ini terkait perkembangan Cina dibidang ekonomi serta pengaruh besar dari kekuatan militer maupun politik diwilayah Asia Pasifik khususnya Laut Cina Selatan demi kelancaran jalur perdagangan serta kerja sama ekonomi yang dimiliki Jepang. Selebihnya pengawasan koordinasi dengan negara-negara lai juga menjadi kepentingan nasional Jepang yang harus di jaga, seperti kerja sama dengan Amerika Serikat dan Indonesia, serta Asean dalam organisasi kerjasama ekonomi yang semakin terganggu oleh ekspansi Cina.<sup>10</sup> Sehingga perdagangan sebagai prioritas kebijakan ekonomi Jepang dengan meningkatkan koordinasi ekonomi diantara negara-negara berkembang.

---

<sup>10</sup> "Laut Cina Selatan Ajang Perebutan Sumber Minyak", dalam [www.selamatkan-indonesia.net](http://www.selamatkan-indonesia.net), diakses tanggal 11 November 2012.



Kawasan Asia Tenggara selama ini telah dipersiapkan Jepang sebagai kawasan tujuan ekspor, tujuan investasi, dan sumber bahan baku bagi industri Jepang. Semua aspek-aspek tersebut, mendasari Jepang untuk lebih meningkatkan peran ekonominya dalam perdagangan, bantuan pembangunan pemerintah (*Official Development Assistance /ODA*), dan sumber investasi langsung (*Foreign Direct Investment /FDI*). Ketiga elemen diatas, telah membawa Jepang menjadi salah satu mitra dagang utama bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Tidak bisa dipungkiri kawasan Asia Tenggara sangatlah berperan penting tidak hanya bagi keamanan ekonomi Jepang, namun juga bagi keamanan politiknya, karena dilihat dari kawasan Asia Tenggara itu sendiri yang saling berdekatan antara Asia Tenggara dan Jepang yang cukup strategis bagi negara-negara yang berhubungan dengan kawasan Asia Tenggara. Arti strategis ini menyangkut banyak aspek, baik ekonomi maupun keamanan politiknya. Sehingga memungkinkan tingkat keterpengaruhan yang mengikat kepentingan kedua belah pihak dalam usaha meningkatkan kemakmuran rakyatnya.

`Semenjak masuk bergabung dalam OECD (*Organisation for Economic Co-operation and*

*Development*), Jepang menjadi lebih aktif dalam memberikan bantuannya. Salah satu penyebabnya ialah karena adanya sejumlah desakan dari negara-negara maju terutama Amerika Serikat. Jika pada tahun 1950 sampai dengan 1960-an motif ODA Jepang ialah murni ekonomi saja (neo-mercantil), namun sejak 1970-an sampai dengan awal 1980-an orientasi ODA-nya bukan hanya bersifat ekonomi saja, namun juga merambah ke politik, terutama dalam melindungi kepentingan-kepentingannya.<sup>11</sup> sejak tahun 1989, dimana Jepang telah menjadi salah satu pendonor terbesar, terutama untuk wilayah Asia, yang mencapai 66 persen dari total ODA yang disalurkan Jepang pada tahun 1994.

Salah satu wilayah regional yang mendapat banyak menerima ODA Jepang ialah wilayah Asia Tenggara. Motif ekonomi pada dasarnya menjadi motif utama penyaluran ODA Jepang ke wilayah Asia Tenggara, sekalipun terdapat motif-motif lainnya, seperti motif politik, yakni sebagai bentuk usaha dalam membendung pengaruh komunisme Cina di negara-negara Asia Tenggara yang

---

<sup>11</sup> Akitoshi Miyashita, "Gaiatsu and Japan's Foreign Aid: Rethinking the Reactive-Proactive Debate", dalam *Jurnal International Studies Quarterly*, Vol. 43 No. 4 (Dec, 1999), hlm. 696, yang diakses dari <http://www.jstor.org/stable/3014027> pada tanggal 19 November 2012.

notabene merupakan sumber bahan-bahan mentah bagi industri Jepang, serta basis pasar komoditas mereka.

Tabel 4.4  
Official Development Assistance Jepang  
Di Asia Tenggara

Negara Penerima	2008	2009	2010
Indonesia	1.230.620.000	1.046.530.000	1.392.510.000
Malaysia	154.510.000	142.960.000	2.060.000
Laos	495.590.000	418.980.000	413.790.000
Singapura	-	-	-
Filipina	47.990.000	309.270.000	531.190.000
Thailand	618.510.000	77.760.000	11.400.000
Vietnam	2.551.930.000	3.731.690.000	2.940.080.000
Myanmar	543.430.000	355.830.000	355.080.000
Brunai	-	-	-
Kamboja	742.840.000	721.430.000	733.730.000

Sumber: "Net official development assistance received (current US\$)", Dalam <http://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ODAT.CD> Diakses tanggal 23 Februari 2013.

Apabila melihat tabel diatas hampir semua negara di Asia Tenggara menerima Official Development Assistance dari Jepang kecuali Singapura dan Brunai. Dari sejumlah ODA yang disalurkan Jepang ke Asia, Asia Tenggara (secara keseluruhan) merupakan kawasan yang paling banyak menerima ODA Jepang, terutama ODA Jepang yang bersifat bilateral. Asia Tenggara merupakan wilayah yang banyak mengandung kekayaan alam yang vital

bagi keberlangsungan industri Jepang (selain juga letak geografis serta potensi pasar yang dimilikinya), seperti sumber bahan-bahan mentah (*raw materials*) ataupun juga sumber dari berbagai jenis energi yang ada, seperti minyak bumi, gas alam, serta batu bara. Bantuan yang diberikan Jepang ke Asia Tenggara juga sebagai alat utama bagi Jepang untuk menjalin kerjasama tidak hanya di bidang ekonomi namun juga sebagai jaminan untuk mengamankan kepentingannya di kawasan Asia Tenggara.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Jepang merupakan negara yang mempunyai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat, dan Kekuatan ekonomi Jepang sangat bergantung pada Industrinya yang sangat maju. Dalam melakukan aktifitas kegiatan industrinya tersebut, Jepang memerlukan sumberdaya baik sumber daya alam maupun sumber daya energi. Namun dalam memenuhi kebutuhan industrinya, Jepang tidak dapat memenuhi sendiri karena Jepang merupakan salah satu negara yang sangat miskin akan sumber daya alam. Dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber Dayanya tersebut Jepang harus mengimpor dari negara lain misalnya, untuk sumber daya energi, Jepang mengimpor dari negara-negara di kawasan timur tengah. Dan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya alam Jepang mengimpor Dari negara-negara kawasan asia tenggara.

Begitu juga dengan hasil industri Jepang, Jepang mengekspor hasil industrinya ke berbagai kawasan seperti Amerika Serikat, Asia Timur, Asia Tenggara dan Australia. Dalam melakukan kegiatan Ekspor-import tersebut, Jepang mengambil transportasi laut sebagai transportasi utama dalam melakukan aktifitas ekonominya

itu. Laut Cina Selatan merupakan jalur transportasi utama yang dilalui oleh Jepang dalam melakukan aktifitas tersebut.

Dalam menjaga kelancaran aktifitas ekonominya terutama dalam menjamin kelancaran jalur lautnya, Jepang harus selalu menjaga stabilitas keamanan kawasan. Ketika di Laut Cina Selatan terjadi sengketa, ini merupakan ancaman bagi stabilitas ekonomi Jepang mengingat Laut Cina Selatan adalah Jalur terpenting bagi Jepang, sehingga apabila stabilitas keamanan di Laut Cina Selatan terganggu akan berimbas kepada terganggunya aktifitas kapal laut Jepang. Jepang memang bukan negara yang berkonflik di Laut Cina Selatan namun Jepang mempunyai kepentingan yang sangat besar.

Dalam sengketa Laut Cina Selatan, Jepang mengambil kebijakan yang aktif, Jepang tidak hanya menyerukan perdamaian di Laut Cina Selatan namun Jepang juga bertekad memainkan peran utama dalam konflik tersebut. Jepang aktif menyuarakan perdamaian di Laut Cina Selatan karena Jepang tidak ingin terjadi pecah konflik terbuka di kawasan tersebut.

Laut Cina Selatan merupakan laut "semi tertutup" (semi enclosed sea) yang menghubungkan samudra hindia dan pasifik dan terletak diantara asia daratan dan

kepulauan. Laut Cina Selatan dikelilingi oleh banyak negara antara lain Cina, Taiwan, Filipina, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Brunai Darussalam, dan Indonesia. Sengketa di laut Cina Selatan tidak hanya terjadi antar dua negara namun banyak negara yang mengklaim wilayah tersebut. Sengketa di Laut Cina Selatan tersebut yaitu antara Cina, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Filipina, Dan Brunai darussalam. Konflik senjata pertama kali terjadi di wilayah Laut Cina Selatan pada tahun 1974 yaitu antara Cina dan Vietnam. Kemudian yang kedua terjadi pada tahun 1988 yang dilatarbelakangi oleh semakin intensifnya persaingan Cina-Vietnam di Indocina. Konflik di Laut Cina Selatan sempat mereda dan kembali memanas pada tahun 2009. Ketidakstabilan di wilayah Laut Cina Selatan sangat mempengaruhi ekonomi Jepang, terlebih lagi Cina yang merupakan rival Jepang dalam berbagai bidang adalah salah satu negara yang mengklaim Laut Cina Selatan. Sehingga Jepang harus mengambil Kebijakan untuk melindungi kepentingannya tersebut.

Jepang mempunyai dua kepentingan mendasar yang harus di lindungi, yang pertama adalah kepentingan Politik Jepang. Yang pertama adalah jepang ikut serta dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan Laut Cina Selatan. Sebagai upaya untuk mengamankan

kepentingannya, maka Jepang berusaha untuk meningkatkan perannya dalam bidang Politik keamanan, hal ini ditunjukkan dengan masuknya Jepang dalam forum kerjasama ASEAN Regional Forum. Dalam ARF disamping motif kerjasama keuangan, dorongan lainnya terkait dengan motif politik dan keamanan. Selain itu Jepang juga sering melakukan patroli gabungan di kawasan tersebut untuk mencegah terjadinya pecah konflik terbuka.

Dalam melindungi kepentingan politiknya, Jepang juga melakukan kerjasama di bidang militer dan bidang pertahanan dengan negara-negara kawasan seperti Indonesia, Kamboja, Australia dan juga Amerika Serikat. Jepang juga sering melakukan latihan militer bersama dengan negara-negara tersebut. Selain itu Jepang juga meningkatkan kekuatan dibidang pertahanan selain untuk mencegah konflik terbuka di Laut Cina Selatan, untukantisipasi terkait perkembangan militer Cina yang semakin meningkat.

Dalam meningkatkan kekuatan pertahananya Jepang juga melakukan beberapa hal antara lain Pada tahun 2006 dibentuk *Defense Posture Review Board* di dalam *Japan Defense Agency* (JDA), yang melakukan rangkaian diskusi untuk mengulas kapabilitas pertahanan Jepang. Jepang melakukan perubahan kebijakan pertahanan Puncaknya saat



parlemen menyetujui usulan PM Jepang Shinzo Abe untuk membentuk Departemen Pertahanan sebagai peningkatan status Badan Pertahanan Jepang atau Japan Defence Agency dan diwujudkan 9 Januari 2007 menjadi Departemen pertahanan Jepang. Departemen Pertahanan Jepang adalah perubahan dari Badan Pertahanan Jepang. Kekuatan militer Jepang juga terus ditingkatkan dari tahun ketahun terkait isu-isu yang terjadi di kawasan Asia pasifik. pada Desember 2010 lalu, Tokyo telah mengumumkan haluan Pertahanan Baru sebagai respons atas meningkatnya anggaran militer Cina dan sepak-terjangnya di kawasan Asia Pasifik.

Selain Kebijakan untuk melindungi kepentingan politiknya, Jepang juga mempunyai kebijakan untuk melindungi kepentingan ekonominya. Sebagai negara yang mendasarkan kehidupan utamanya dari perdagangan, kepentingan ekonomi Jepang biasanya ikut menentukan arah kebijakan politik luar negerinya. Karena aktifitas ekonomi Jepang sangat bergantung pada ekspor dan impornya maka Jepang harus mengambil kebijakan dengan dasar melindungi jalur importnya di Laut Cina Selatan. Impor Jepang yang melewati jalur tersebut tergolong banyak antara lain minyak, batu bara, Gas alam cair, Produk susu, ikan, udang, gandum, maizena, buah-buahan,

gula, kopi, coklat,dll. Selain untuk melindungi jalur impor, jepang juga mengambil kebijakan untuk melindungi jalur eksportnya.

Jepang juga melakukan kerjasama dengan negara-negara di asia tenggara, selain untuk memastikan kelancaran aktifitas ekonominya,juga untuk menekan perkembangan Cina di laut Cina Selatan. Sejak lama Jepang sudah khawatir dengan kemajuan ekonomi Cina,kemajuan ekonomi Cina secara tidak langsung membuat Cina berambisi untuk menguasai kawasan perairan Asia Tenggara,terutama kawasan Laut Cina Selatan. Industri dan Investasi luar negeri Jepang menjadi elemen utama bagi Jepang dalam melancarkan kerja sama ekonominya di kawasan asia tenggara. Jepang memiliki perusahaan - perusahaan terbesar yang berinfestasi di Asia Tenggara, sebagian besar kekayaan Jepang bergantung pada perusahaan - perusahaan multinasional yang juga memiliki kepentingan signifikan di Asia Tenggara. Selain industri dan Investasi, Bantuan luar negeri merupakan instrumen yang digunakan Jepang dalam bidang ekonomi dan keamanan terhadap negara- negara yang dianggap menjadi kepentingan nasionalnya, hal ini terkait perkembangan Cina dibaidang ekonomi serta pengaruh besar dari kekuatan militer maupun politik

diwilayah Asia Pasifik khususnya Laut Cina Selatan demi kelancaran jalur perdagangan serta kerja sama ekonomi yang dimiliki Jepang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Dari Buku

- Abdurahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta, Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Al, Agoes, et., *Konvensi Hukum Laut 1982 dan Masalah Pengaturan Hak Lalu Lintas Kapal Asing*, Bandung, cv. Abidin, 1991.
- Bateman. Sam. Emmers, Ralf, . *Security and International Politics in the South China Sea*, New York: Routledge, 2009.
- Buzzan, Barry, *People, States and Fear, An Agenda for International Security Studies In The Post-Cold War Era*, MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall, Great Britain, 1991.
- Habib, A. Hasan, *Kapita Selekta: Strategi dan Hubungan Internasional*, Jakarta: CSIS, 1996.
- Inoguchi, Takashi, *Kemacatan Dalam Permasalahan Kontinen dan Gangguan-Gangguan Struktural di Pasifik Barat*, dalam Robert A, Scalpin, *Masalah Keamanan Asia*, CSIS, Jakarta, 1990.
- Irsan, Abdul *Politik Domestik, Global dan Regional*, Hasanudin University Press, Makassar, 2005.
- Murray, Douglas J. and Viotty, Paul R., *The Defence Policies of Nations: A Comparative Study*, Jhon Hopkins University press, London, 1992.
- Nevitt Dupuy, Trevor, *International Military and Defence Encyclopedia*, Brassey's, United States 1992, hal. 7.
- Ras, Abdul Rivai, *Konflik Laut Cina Selatan dan Ketahanan Regional Asia Pasifik*, PT. Rendino Putra Sejati dan TNI AL: Jakarta, 2001, hlm.65.
- Sasmi Tiara, Dini, *Konflik Laut Cina Selatan Tantangan bagi ASEAN*, 2009.

Tow, William T., Thomson, Mark J., Yamamoto, Yoshinobu, and Limaye, Satu P., *Asia-Pacific Security: US, Australia and Japan and The New Security Triangle*, New York: Routledge, 2007.

Usman, Asnani & Sukma, Rizal, *Konflik Laut Cina Selatan, Tantangan Bagi ASEAN*, Jakarta, CSIS, 1997.

#### Sumber Dari Website

"Angkatan Laut AS, Jepang Dan Australia Akan Latihan Militer Di Laut China Selatan", dalam [http://www.theglobal-review.com/content\\_detail.php?lang=en&id=5326&type=8#.US7vIWc4lqg](http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=en&id=5326&type=8#.US7vIWc4lqg) diakses tanggal 25 Februari 2013.

"Angkatan Laut Jepang-India gelar latihan bersama", dalam <http://www.antaraneews.com/berita/314400/angkatan-laut-jepang-india-gelar-latihan-bersama> diakses tanggal 20 November 2012.

"Amerika-Jepang", dalam <http://www.mofa.go.jp/regional/n-america/us/q&a/ref/6a.htm>, diakses pada 5 November 2012.

"AS dan Jepang Intensifkan Kerja Sama Hankam", dalam <http://indonesian.cri.cn/201/2012/05/01/1s127331.htm>, diakses tanggal 11 November 2012.

"Australia and asia pasific community", dalam <http://www.oseafas.wordpress.com> diakses pada 11 November 2012.

"Cermati Tiga Kekuatan Militer Baru di Asia Pasifik: Cina, Jepang dan India", dalam [http://www.theglobal-review.com/content\\_detail.php?lang=id&id=8080&type=99#.US7je2c4lqh](http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=8080&type=99#.US7je2c4lqh) diakses tanggal 25 Februari 2013.

- "China Peringatkan Filipina Atas Sengketa Laut China Selatan.", dalam <http://www.swatt-online.com/2011/06/china-peringatkan-filipina-atas-sengketa-laut-china-selatan/>, diakses tanggal 31 Oktober 2012.
- "China Umumkan Peningkatan Anggaran Pertahanan", dalam [http://www.analisadaily.com/news/read/2012/03/05/38879/china\\_umumkan\\_peningkatan\\_anggaran\\_pertahanan/#.US8CzGc4lqg](http://www.analisadaily.com/news/read/2012/03/05/38879/china_umumkan_peningkatan_anggaran_pertahanan/#.US8CzGc4lqg) diakses tanggal 25 Februari 2012
- "Dialog Strategis Indonesia-Jepang Singgung Sengketa Laut China Selatan", Dalam <http://jaringnews.com/internasional/asia/34463/dialog-strategis-indonesia-jepang-singgung-sengketa-laut-china-selatan> diakses tanggal 22 Februari 2013.
- "Energy imports; net (% of energy use) in Japan", dalam <http://www.tradingeconomics.com/japan/energy-imports-net-percent-of-energy-use-wb-data.html> diakses tanggal 23 Februari 2012.
- "Filipina Bekerjasama Dengan Jepang, Australia di spartly", dalam [http://apdforum.com/en\\_GB/article/rmiap/articles/online/features/2012/01/05/vietnam-australia-philippines](http://apdforum.com/en_GB/article/rmiap/articles/online/features/2012/01/05/vietnam-australia-philippines), diakses pada 15 November 2012.
- "Filipina Coba Hadang China dengan Bantuan Jepang", dalam <http://jakarta.okezone.com/read/2013/02/06/411/757760/filipina-coba-hadang-china-dengan-bantuan-jepang> diakses tanggal 25 Februari 2013
- "India ganti taktik terkait Laut Cina Selatan", dalam <http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/online/features/2012/12/11/india-sea-tactics> diakses tanggal 25 Februari 2013.
- "Indonesia -Jepang Siap Wujudkan Stabilitas Laut China Selatan", Dalam <http://jaringnews.com/internasional/amerika/17247/indonesia--jepang-siap-wujudkan-stabilitas-laut-china-selatan> diakses tanggal 22 Februari 2013.

- "Japan Export", dalam <http://www.tradingeconomics.com/japan/exports>  
Diakses tanggal 23 Februari 2013.
- Japan Exports and Imports (2003-2005)", dalam [http://www.economywatch.com/world\\_economy/asia-pecific/export-import.html](http://www.economywatch.com/world_economy/asia-pecific/export-import.html) diakses tanggal 11 November 2012.\
- "Japan-US Joint Declaration on Security ", dalam <http://www.mofa.go.jp/region/n-america/security/security/html>, diakses tanggal 5 November 2012.
- "Jepang Bekukan Investasi Otomotif di China", Dalam <http://otomotif.kompas.com/read/2012/11/14/5340/Jepang.Bekukan.Investasi.Otomotif.di.China>  
Diakses tanggal 23 Februari 2013.
- "Jepang Bidik Investasi sia Tenggara", Dalam <http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/101676>  
Diakses tanggal 23 februari 2013.
- "Jepang-Filipina Tingkatkan Kerjasama Maritim", dalam <http://www.wartanews.com/internasional/e55e48d2-85de-ab32-e57b-8bd7d6cacfa5/jepang-filipina-tingkatkan-kerjasama-maritim> diakses tanggal 25 Februari 2013.
- "Jepang di Asia Tenggara", dalam [http://www.waspada.co.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=61364&Itemid=27](http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=61364&Itemid=27) diakses tanggal 5 Noveber 2012.
- "Jepang-Indonesia dan Konflik Laut Cina Selatan," Dalam <http://www.jpf.or.id/artikel/studi-jepang-pertukaran-intelektual/jepang-indonesia-dan-konflik-laut-cina-selatan>, Diakses 10 Juli 2012.
- "Jepang Resmi meningkatkan Badan Pertahanannya Menjadi Departemen Penuh", dalam <http://www.voanews.com/indonesia.cfm>, diakses 20 November 2012.

- "Jepang Tambah Anggaran Militer", dalam <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/01/08/mgaz3s-jepang-tambah-anggaran-militer> diakses tanggal 25 Februari 2013
- "Jepang Tingkatkan Kerjasama Dengan Australia", dalam <http://www.klikheadline.com/in/berita/jepang-australia-tingkatkan-hubungan-pertahanan.html>, diakses tanggal 6 November 2012.
- "Jepang turun tangan dalam sengketa Laut Cina Selatan", dalam <http://kampus.okezone.com/read/2011/09/21/413/505059/jepang-turun-tangan-dalam-sengketa-laut-china-selatan> diakses tanggal 14 Desember 2012.
- "Kebutuhan Batu Bara Jepang", dalam <http://cetak.kompas.com>, Diakses tanggal 4 November 2012.
- "Kerjasama Indonesia-Jepang" dalam <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/06/17/88644>, diakses tanggal 7 November 2012.
- "Khawatirkan Cina, Jepang Tawarkan Investasi dan Kerjasama Maritim kepada ASEAN", dalam [http://www.ipotnews.com/index.php?jdl=Khawatirkan\\_Cina\\_Jepang\\_Tawarkan\\_Investasi\\_dan\\_Kerjasama\\_Maritim\\_kepada\\_ASEAN&level2=&level3=&level4=topnews&id=832829&urlImage](http://www.ipotnews.com/index.php?jdl=Khawatirkan_Cina_Jepang_Tawarkan_Investasi_dan_Kerjasama_Maritim_kepada_ASEAN&level2=&level3=&level4=topnews&id=832829&urlImage) diakses tanggal 8 Desember 2012.
- "Konflik Laut Cina Selatan," Dalam <http://irjournal.webs.com/apps/blog/show/4113964-konflik-laut-cina-selatan>, Diakses pada 10 September 2012.
- "Laut Cina Selatan Ajang Perebutan Sumber Minyak", dalam [www.selamatkan-indonesia.net](http://www.selamatkan-indonesia.net), diakses tanggal 11 November 2012.
- "Laut Cina Selatan-Wilayah Sengketa, Beragam Nama," Dalam <http://www.anneahira.com/laut-cina-selatan.htm> Diakses pada 11 Juli 2012.



- "Mencari resolusi untuk Laut China Selatan", dalam <http://www.bisnis-kepri.com/index.php/2011/07/mencari-resolusi-untuk-laut-china-selatan/> diakses tanggal 22 Februari 2013.
- "Military Strenght", dalam [http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country\\_id=China](http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=China) diakses pada 28 Oktober 2012.
- "Negara Sumber Impor Jepang", dalam <http://atanitokyo.blogspot.com>. Diakses tanggal 4 November 2012.
- "Net official development assistance received (current US\$)", Dalam <http://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ODAT.CD> Diakses tanggal 23 Februari 2013.
- "Pengaruh Keamanan Regional Bagi Keamanan Nasional Indonesia (Kasus Sengketa Laut Cina Selatan)", dalam <http://budisusilosoepondji.wordpress.com/2012/05/23/pengaruh-keamanan-regional-bagi-keamanan-nasional-indonesia-kasus-sengketa-laut-cina-selatan/>, diakses pada 31 Oktober 2012.
- "Peningkatan pertahanan Jepang", dalam [http://www.mod.go.jp/epolicy/f\\_work/taikou05/fy200501.Pdf](http://www.mod.go.jp/epolicy/f_work/taikou05/fy200501.Pdf) Diakses tanggal 6 November 2012.
- "PM India Akan Berkunjung ke Jepang Bahas Kerjasama Keamanan", dalam [http://vibizdaily.com/update\\_vibizdaily/index/18662/10](http://vibizdaily.com/update_vibizdaily/index/18662/10) diakses tanggal 20 November 2012.
- "Semangat Berdialog dan Bekerjasama dikedepankan dalam ARF", dalam [http://asean2011.kemlu.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=392%3Asemangat-berdialog-dan-bekerjasama-dikedepankan-dalam-arf&catid=86%3Ahardnews&Itemid=109&lang=en](http://asean2011.kemlu.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=392%3Asemangat-berdialog-dan-bekerjasama-dikedepankan-dalam-arf&catid=86%3Ahardnews&Itemid=109&lang=en) diakses tanggal 22 Februari 2013.

- "Sengketa Teritorial Laut China Selatan," Dalam <http://djangka.org/2012/04/30/sengketa-teritorial-laut-china-selatan/> Diakses pada 18 September 2012.
- "Southeast Asia:Region on", dalam [http://www.inboundlogistics.com/cms/userfiles/sotheast\\_asia\\_graph\\_inline\\_0113.png](http://www.inboundlogistics.com/cms/userfiles/sotheast_asia_graph_inline_0113.png) diaksep tanggal 26 Februari 2013.
- Stroy,Ian," Japan Steps Up to the South China Sea Plate", dalam <http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303567704577516252626896574.html> diakses tanggal 15 desember 2012.
- Sumangkul,Willy F.," Potensi Konflik Laut Cina Selatan", dalam <http://www.fkpmaritim.org/?p=250>, diakses tanggal 7 November 2012.
- "The US-Japan Alliance", dalam <http://ftp.fas.org/irp/workd/japan/jda.htm>, diakses tanggal 6 November 2012.
- "Tiga kapal jepang merapat ke indonesia", dalam <http://divisi.blogspot.com/2012/02/tiga-kapal-latih-jepang-merapat-ke.html> diakses tanggal 5 November 2012.
- "Transformasi Badan Pertahanan Jepang dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Keamanan Maritim Asia Pasifik", dalam <http://www.fkpmaritim.org/?p=879>, diakses pada 10 November 2012.
- "Visit to India by Minister for Foreign Affairs Koichiro Gemba (Overview)", dalam [http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/india/meeting1204\\_fm.html](http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/india/meeting1204_fm.html) diakses tanggal 19 November 2012.
- Zhang Yaohua, "The Role of Japan on the South China Sea Issue", dalam [http://www.ciis.org.cn/english/2011-11/18/content\\_4635283.htm](http://www.ciis.org.cn/english/2011-11/18/content_4635283.htm) diakses tanggal 14 Desember 2012.

**Sumber dari Jurnal**

Lewis, Peter Young, "The Potential for Conflict in South China Sea: The Various Names Given to the Spartly", *Asian Defence Journal*, vol.11/no.95

**Sumber dari Surat kabar**

Kompas, 24 Maret 1995.

Mainichi Daily News, 2011.